

**ALASAN INDIA DALAM MELANJUTKAN KERJA SAMA
DENGAN TIONGKOK DI SUNGAI BRAHMAPUTRA**

SKRIPSI



Disusun oleh:

I Gusti Agung Ngurah Dicky Harvana

NIM. 071611233063

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Semester Genap 2019/2020

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ditulis oleh individu selain penyusun kecuali bila dituliskan dengan format kutipan (langsung ataupun tidak langsung) dalam isi Skripsi.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, Mei 2020



(I Gusti Agung Ngurah Dicky Harvana)

SURAT KETERANGAN TES KESAMAAN



KEMENTERIAN REKREASI, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PUSAT PENGEMBANGAN PUBLIKASI ILMIAH
Kampus B, Gedung Pasia B, Jl. M. Y. Sidiyasa, 11, 60115 Surabaya, Telp. (031) 8912111
www.pengembanganpublikasiilmiah.unma.ac.id

SURAT KETERANGAN TES KESAMAAN (SIMILARITY)

Nomor: 1173/021/00.06.2020



Kami telah melakukan tes kesamaan (similarity) terhadap Skripsi/Thesis/Dicertas/Artikel atau karya pengarang di bawah ini:

Nama : I Gusti Agung Ngurah Dicky Harvana
NIM : 071611243063

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi/Thesis/Dicertas/Artikel:

Judul : Alasan India Dalam Melanjutkan Kerja Sama Dengan Tiongkok Di Sungai Brahmaputra
Paper/Class ID : 1338172063 / 24036550
Hal/Kata : 51 hlm. / 13393 kata
Tanggal : 05 Juni 2020
Petugas Uji : Arya Wijaya Pramodha Wardhana


Hasil menunjukkan SIMILARITY INDEX sebesar 58 (LULUS UJI)

Surat keterangan ini kami lampirkan hasil tes sebagai bukti kelulusan tes kesamaan (similarity) menggunakan Program TurnItIn.

Demi ini kami persyarkan ini kamibus untuk keperluan akses administrasi masing-masing.

Surabaya, 05 Juni 2020

641.61.011.151P.0149111


Prof. Dr. M. Y. Sidiyasa, Ph.D.
N. P. 197.05041993.21001

**ALASAN INDIA DALAM MELANJUTKAN KERJA SAMA
DENGAN TIONGKOK DI SUNGAI BRAHMAPUTRA**

SKRIPSI

Maksud: sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 pada Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

Disusun oleh:

I Gusti Agung Ngurah Dicky Harvana

NIM: 071611233063

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Semester Genap 2019/2020

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

ALASAN INDIA DALAM MELANJUTKAN KERJA SAMA DENGAN
TIONGKOK DI SUNGAI BRAHMAPUTRA

Skripsi ini telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk diujikan,

Dosen Pembimbing

(Wahyudi Purnomo, Drs., M.Phil.)
NIP. 195609211988101001



HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Komisi Penguji
secara daring pada 24 Juni 2020 pukul 08.00 WIB**

**Komisi Penguji,
Ketua**

Irfa Puspitasari, S.IP., MA.
NIP. 19850325 201012 2 002

Anggota I

Anggota II

Dr. Phil. Siti Rokhmawati Susanto, S.IP., MIR.
NIP. 19770301 200003 2 001

Joko Susanto, S.IP., M.Sc.
NIP. 19761015 200012 1 002



HALAMAN PERSEMBAHAN

Oṃ vedātmanāya vidmahe hiraṇyagarbhāya dhīmahi tanno brahmā prachodayat

Dengan puji syukur, hamba haturkan tulisan mengenai Sungai Brahmaputra ini sebagai bentuk puja kepada Dewa Brahma dan Dewi Saraswati yang telah memberikan kehidupan serta pengetahuan untuk bekal kehidupan di masa depan.

Untuk Ibu, Bu Galuh, Tuniang, dan Dinda yang menjadi motivasi terbesar dalam menyelesaikan perkuliahan, sekaligus memberikan dukungan moral dan material.

Untuk Ajik yang selalu berusaha untuk menjadi ayah yang baik, walaupun harus terpisah jarak dan waktu yang berbeda dengan keluarga.

Serta untuk Tuda yang telah mengantarkan bersekolah dari kecil serta menjadi guru yang mengajarkan berbagai ilmu dan permainan catur yang menjadi bagian penting dalam kehidupan ini. Tanpa semua itu, penulis tidak akan mampu untuk hidup dan berpikir, hingga kini berhasil memperoleh gelar sarjana.

Semoga Tuda bangga dan menyatu dengan-Nya.

HALAMAN INSPIRASIONAL

“One whose mind remains undisturbed amidst misery, does not crave for pleasure, and free from attachment, fear, and anger, is called a sage of steady wisdom”

- Bhagavad Gita (2.56).

“Never put until tomorrow what you can do today”

- I Gusti Agung Ngurah Suka Arsa

“Prefer et Obdura, dolor hic tibi proderit olim”

- Ovid, Amores

“Anxiety is the dizziness of freedom”

- Søren Kierkegaard, The Concept of Anxiety

“He who climbs upon the highest mountains laughs at all tragedies, real or imaginary.”

- Friedrich Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra

“Man is condemned to be free. Condemned, because he did not create himself, yet is nevertheless at liberty, and from the moment that he is thrown into this world he is responsible for everything he does”

- Jean Paul Sartre, Existentialism is a Humanism

*“Home is behind, the world ahead,
And there are many paths to tread
Through shadows to the edge of night,
Until the stars are all alight.
The world behind and home ahead,
We'll wander back to home and bed”*

- J. R. R. Tolkien, The Fellowship of the Ring

“The distance between insanity and genius is measured only by success”

- Ian Fleming, Thunderball

“If you don't know where you're going, any road will take you there”

- George Harrison, Any Road

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan izin-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Tidaklah mudah bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, terlebih lagi karena berbagai macam halangan dan rintangan, mulai dari pergantian topik hingga pandemi yang berdampak secara langsung terhadap proses penulisan. Namun pada akhirnya penulis berhasil untuk menyelesaikan tulisan ini dengan hasil yang cukup memuaskan, karena skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai.

Skripsi ini merupakan wujud hasil dari proses menimba ilmu di Universitas Airlangga selama empat tahun terakhir, dengan berbagai suka maupun dukanya. Sebagai persembahan terakhir kepada almamater, penulis pada akhirnya memutuskan untuk mengambil topik yang sangat bertentangan dengan idealisme serta prinsip hidup penulis sebagai bentuk ujian terakhir sebelum berproses di tahapan selanjutnya. Penulis juga pada akhirnya memilih Sungai Brahmaputra dengan alasan pribadi, yaitu sebagai bentuk persembahan kepada Dewa Brahma dan Dewi Saraswati yang sangat berjasa dalam tahapan *Brahmacari*. Walaupun dilandasi alasan *personal*, penulis berharap bahwa tulisan ini dapat berkontribusi terhadap pemahaman isu tersebut serta mendorong ketertarikan kawan-kawan HI lainnya terhadap kawasan Asia Selatan yang seringkali diremehkan.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang selalu mendorong dan menyemangati penulis agar tidak patah semangat. Terima kasih penulis sampaikan untuk keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan dari rumah Tuniang, Ibu, Bu Galuh, dan Dinda. Untuk Ajik yang harus bekerja dan terpisah dari keluarga untuk memenuhi kewajiban sebagai kepala keluarga. Serta khusus untuk Tuda yang menjadi motivasi utama dari penulis untuk menjadi yang terbaik, *Amor Ring Acintya*. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Tuda Ngurah dan Tuniang Sri di Pondok Indah yang selalu menerima kedatangan penulis dengan ramah, Tuda Mayun dan Tuda Putra yang selalu memberikan dukungan spiritual, untuk Om Ngurah sekeluarga di Mambal dan Bu Mas yang memiliki arti besar dalam proses perkuliahan penulis, serta

keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu: **Maaf dan Terima Kasih atas segalanya!**

Untuk Natasha Puspa Andania yang telah mengisi hari dan selalu mendorong penulis untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Terima Kasih.

Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran staff dan pengajar Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga; Pak Muttaqien, Bu Irma, Mas Joko Susanto, Mas Wahyu, Mas Radityo, Pak Dugis, Bu Ani, Bu Lilik, Mbak Citra, Mbak Irfa, Mas Yunus, Mbak Indah, dan Mbak Ifa. Terima kasih kepada **Pak Wahyudi** dan **Mas Agas** yang sudah membimbing serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir, tanpa kalian penulis tidak akan mampu menyelesaikan tulisan ini tepat waktu.

Terima kasih kepada teman-teman HI Angkatan 2016 yang sudah menemani setiap tawa dan air mata karena tugas dan paper yang tiada akhir, kalian adalah alasan penulis mampu untuk bertahan dari beratnya kehidupan di HI. Terima kasih Naomi Devi yang selalu percaya akan kemampuan penulis dan selalu mengingatkan bayar UKT agar tidak lupa lagi, yang juga telah rela membimbing penulis hingga selesai sidang, I'm so lucky to have a friend such as you! Untuk *Semeton Bali*: Citra, Ramon, dan Jeremy yang sudah menjadi teman rantauan di Surabaya, terima kasih atas semuanya, semoga jalan kita dimudahkan ke depannya. Terima kasih Dibyo dan Sasha yang sudah menjadi Komting dan Samting terbaik bagi angkatan kita. Untuk GGWP, tetap semangat *ndang kerjakno!* Untuk Catherine, Santi, Melati, Tasia, Dian, Dede, Marsya, Iqbal, Bayu, Mbah, Alif, Erza, Idang, Sandika, Zulfa, Qubba, Abima, Kent, Michael, Nada, Dandi, Danika, Dinka, Diva, Lucky, Papa, Mitha, Neysa, Ratya, Vivi, Yasin, Yocan dan kawan-kawan lain yang tidak bisa disebutkan tapi selalu mendengar pertanyaan aneh dan cerita *ngalur-ngidul* khas *a la* penulis di Cakra: TERIMA KASIH!

Terima kasih juga untuk kakak dan adik tingkat di kampus: Kak Mia, yang telah membantu penulisan skripsi penulis sekaligus mendengarkan keluh kesah dalam prosesnya. Kak Katong, yang selalu mendukung penulis selama di HI *since day one*. Kak Yulia, yang khas dengan logat balinya setiap berbicara. Mas Rico, Mbak Cinda, Mas Hasbi, Mas Amri, Mbak Demes, Mbak Yulia, Mbak Ria, Mbak Aisyah, dan Nina yang sudah menjadi partner debat selama kuliah. Serta untuk Hayu, yang sudah menjadi teman baik dengan segala cerita hidupnya.

Terima kasih untuk teman-teman **Kabinet Merdeka FISIP UNAIR 2018**: Risyad, Ruvan, Puspi, Sofie, Aul, Aden, Bayu, Elni, Agri, Ghifari, Jajul, Rin, Shinta, Uswah, dan Wewe. **K.ILPRES**: Wili, Ade, Gadis, Ella, Tata, Lelly, Ajeng, Nimas, Ilham, Asiyah, Adinda + Fety. **UKMKHD UNAIR**: yang selalu mengingatkan penulis kepada Tuhan: Tiwi, Caca, Adnya, Jessita, Dewa, Gung Feby, Nana, Arjava, Budi, Cece, Neni, Gea, Hendra, Kirana, Nina, Nita, Trisna, Rani, Yuta, Utik, Sonia, dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan. **SEMETON ASTAGA**: Eka, Patria, Yoga, Arya Prasetya, Kak Wis, Dedi, Diwan, dan yang lainnya, semoga tetap menjadi teman di masa depan. Terima kasih juga untuk **Kontrakan Graha Dewata x KL di Malang**, dan teman-teman lainnya: Nanta, Panji, Tenia, Fefe, Galang, Gung Mitha, Richard, Bagus, Reza, Sila, Cintya Ayu, Intan, Farhan, Arif dan lainnya yang tidak dapat disebutkan semuanya

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Maka kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan sangat membantu penyempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat dan mampu berkontribusi terhadap kebutuhan pembaca, Terima Kasih.

Denpasar, 4 Juni 2020

I Gusti Agung Ngurah Dicky Harvana

dickyagung02@gmail.com

ABSTRAK

Kerja sama antara India dan Tiongkok di Sungai Brahmaputra secara mendadak terhenti akibat konfrontasi yang terjadi di Doklam pada pertengahan tahun 2017. Terhentinya kerja sama tersebut berdampak kepada nihilnya laporan hidrologi Tiongkok kepada India yang semakin memperburuk konflik air yang sudah ada di Sungai Brahmaputra, terutama semenjak pembangunan Bendungan Zangmu oleh Tiongkok yang meningkatkan aktivitas di hulu sungai. Aktivitas tersebut selanjutnya berdampak negatif kepada India yang berada di bawah Tiongkok. Debit air yang tidak stabil, meningkatnya potensi banjir, hingga ancaman yang bersifat politis dari Tiongkok, kesemuanya memiliki potensi untuk menaikkan tensi konflik persengketaan kedua negara di sungai tersebut. Namun pada akhirnya perang atas air dapat dihindari dan kerja sama kedua negara kembali berlanjut pada tahun 2018 dengan disepakatinya MOU baru. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan motif dari berlanjutnya kerja sama India dan Tiongkok, dengan metode penelitian yang deskriptif dengan mengkaji secara kualitatif berdasarkan konflik air dan rasionalitas air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama di Sungai Brahmaputra sangatlah penting bagi India sebagai suatu bentuk upaya untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik serta untuk mewujudkan keamanan air dalam jangka panjang, utamanya dari aktivitas Tiongkok di hulu sungai yang menjadi ancaman paling utama bagi India.

Kata Kunci: *Sungai Brahmaputra, Kerja Sama India-Tiongkok, Konflik Air, Teori Rasionalitas Air.*

ABSTRACT

Cooperation between India and China on the Brahmaputra River was suddenly halted due to the confrontation that took place at Doklam in mid-2017. The cessation of such cooperation has resulted in the cessation of China's hydrological report to India which has further exacerbated the existing water conflict in the Brahmaputra River, especially since the development of the The Zangmu Dam by China is increasing activity at the headwaters of the river. These activities then have a negative impact on India, which is located below China. Unstable water discharges, increased potential for flooding, to political threats from China, all of which have the potential to raise the tension of disputes between the two countries on the river. But in the end, the war on water could be avoided and cooperation between the two countries resumed in 2018 with the signing of a new MOU. This study aims to find the reason for the continued cooperation between India and China, with a descriptive research method that studies qualitatively based on water conflicts and water rationality. The results show that cooperation on the Brahmaputra River is very important for India as a form of effort to prevent the escalation of conflicts and to realize long-term water security, mainly from Chinese activities in the upper reaches of the river which are the most important threat to India.

Keywords: *Brahmaputra River, Sino-Indian Cooperation Water Conflict, Water Rationality Theory.*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	i
HALAMAN TES KESAMAAN	ii
HALAMAN MAKSUD PENULISAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN INSPIRASIONAL	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I – PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Tinjauan Pustaka	6
1.5. Kerangka Berpikir	8
1.5.1. Konflik Air	8
1.5.2. Teori Rasionalitas Air	9
1.6. Hipotesis	11
1.7. Metodologi Penelitian	11
1.7.1. Definisi dan Operasionalisasi Konsep	11
1.7.1.1. Konflik Air	11
1.7.1.2. Kerja Sama Air	11
1.7.1.3. Keamanan Air	12
1.7.2. Tipe Penelitian	12
1.7.3. Jangkauan Penelitian	13
1.7.4. Teknik Pengumpulan Data	13
1.7.5. Teknik Analisis Data	13
1.7.6. Sistematika Penulisan	13
BAB II – RELASI INDIA-TIONGKOK DAN DINAMIKA PENGELOLAAN SUNGAI BRAHMAPUTRA	
2.1. Relasi India dan Tiongkok	14
2.2. Dinamika Kerja Sama di Sungai Brahmaputra	18
2.3. Konfrontasi Doklam	24
2.4. Kelanjutan Kerja Sama India-Tiongkok di Sungai Brahmaputra	27
BAB III – KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN INDIA DALAM KONFLIK SUNGAI BRAHMAPUTRA	
3.1. Ancaman Aktivitas Tiongkok Terhadap Keamanan Air India di Sungai Brahmaputra	31

3.2. Keuntungan India dalam Kerja Sama dengan Tiongkok di Sungai Brahmaputra	40
3.3. Perbandingan Keuntungan dan Kerugian India dalam Kerja Sama Pengelolaan Sungai Brahmaputra dengan Tiongkok	45
BAB IV – DE-SEKURITISASI KONFLIK BRAHMAPUTRA SEBAGAI PILIHAN RASIONAL BAGI INDIA	47
BAB V - KESIMPULAN	51
DAFTAR PUSTAKA	56

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Bab 1

Gambar 1.1. Aliran Sungai Yarlung Tsangpo/Brahmaputra

Bab 2

Gambar 2.1. Peta Persengketaan Wilayah Tiongkok

Tabel 2.1. Proses Kerja Sama Sungai Lintas Batas India-Tiongkok

Bab 3

Tabel 3.1. Permintaan Bersih & Kotor Air Sungai Brahmaputra di Tahun 2050

Tabel 3.2. Publikasi dalam Kerja Sama Tentang Sungai Lintas Batas dalam Dokumen Resmi Bilateral

Tabel 3.3. Perbandingan Keuntungan dan Kerugian India dan Tiongkok

DAFTAR SINGKATAN

MOU	<i>Memorandum of Understanding</i>
ELM	<i>Expert Level Mechanism</i>
PLA	<i>People's Liberation Army</i>
LAC	<i>Line of Actual Control</i>
CCMC	<i>China Central for Military Commission</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sungai Brahmaputra merupakan salah satu sungai besar di Asia Selatan yang bermuara di Tibet dan mengalir melewati Tiongkok, India, dan Bangladesh (Yasuda et al., 2017). Sungai tersebut menjadi salah satu sungai terpanjang di dunia dengan panjang total hingga mencapai lebih dari 2.880 Km; 1.625 Km mengalir melewati Tiongkok dengan nama Yarlung Tsangpo, 918 Km melewati India dengan nama Brahmaputra, Siang, dan Dihang, serta 337 Km melewati Bangladesh dengan nama Yamuna (Encyclopaedia Britannica, 2019). Kondisi ini membuat Sungai Brahmaputra memiliki potensi sumber daya alam yang besar yang dapat dimanfaatkan oleh masing-masing negara yang memiliki akses terhadap aliran di wilayah negaranya (negara riparian).

Gambar 1.1. Aliran Sungai Yarlung Tsangpo/Brahmaputra



Sumber: Geology Page (2014)

Bagi India, Sungai Brahmaputra merupakan sungai yang sangat penting bagi masyarakat yang berada di wilayah Timur Laut, tepatnya di negara bagian Assam dan Arunachal Pradesh yang dilewati langsung oleh sungai tersebut. Sebanyak 61% populasi di Assam bekerja di sektor pertanian atau serupa yang menopang

kehidupan lebih dari 75% masyarakat lainnya di negara bagian tersebut (Nayak & Panda, 2016). Sungai tersebut juga menyediakan ikan-ikan yang menjadi makanan pokok utama sekaligus mata pencaharian sampingan bagi masyarakat di Assam, terutama di musim panas (The Logical Indian, 2017). Sedangkan bagi Tiongkok, aliran Sungai Brahmaputra memiliki kekuatan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat yang terus meningkat.

Namun upaya eksploitasi atas sungai lintas-batas seringkali menimbulkan konflik kepentingan antara negara riparian. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya banjir di Arunachal Pradesh pada tahun 2000 yang menelan 30 korban jiwa dan 100 lainnya hilang, serta lebih dari 50.000 orang kehilangan tempat tinggalnya dengan total kerugian diperkirakan mencapai 23 juta Dollar Amerika Serikat (Rediff. 2000). Pihak India selanjutnya mencurigai adanya aktivitas pembangunan bendungan yang dilakukan oleh Tiongkok yang kemudian rusak dan berdampak kepada munculnya banjir secara tiba-tiba di aliran sungai tersebut (Holslag, 2011). Walaupun memiliki kecurigaan yang mendalam, India pada akhirnya memutuskan untuk melakukan kerja sama bilateral dengan Tiongkok melalui penandatanganan MOU tentang penyediaan data hidrologi di musim panas dari Tiongkok pada tahun 2002. Kerja sama bilateral antara India dan Tiongkok selanjutnya terus berkembang melalui pembaruan MOU setiap lima tahun sekali, perluasan kerja sama yang selanjutnya meliputi manajemen darurat dan laporan hidrologi selama setahun penuh, serta dibentuknya ELM yang berfungsi untuk menghubungkan kepentingan kedua negara serta merekomendasikan kebijakan teknis yang berkaitan dengan Sungai Brahmaputra (Feng, Wang, & Liu, 2019).

Kendati demikian India masih menghadapi berbagai permasalahan dari dalam maupun luar negeri yang berkaitan dengan Sungai Brahmaputra. Satu Limaye (2018) mencatat bahwa masyarakat India menganggap bahwa kerja sama tersebut tidaklah memiliki dampak positif dan malah merugikan India dalam pengelolaan Sungai Brahmaputra, sedangkan pemerintah tetap mendukung pendekatan yang rasional dan menganggap kerja sama tersebut memberikan keuntungan bagi India.

Sehingga terdapat perbedaan pendapat yang mendalam antara masyarakat serta pemerintah India tentang kerja sama bilateral yang dilakukan oleh Tiongkok.

Permasalahan lain yang dihadapi India adalah ancaman aktivitas Tiongkok di bagian hilir sungai. Keputusan Tiongkok untuk membangun Bendungan Zangmu di Sungai Brahmaputra dianggap dapat menimbulkan berbagai permasalahan bagi India, seperti krisis air bersih dan pangan di wilayah Timur Laut India (Ranjan, 2013). Bendungan Zangmu bukanlah satu-satunya bendungan yang dibangun oleh Tiongkok di Sungai Brahmaputra, Tiongkok juga memiliki dua bendungan lain yaitu Jiacha dan Jiexu yang sedang dalam proses pembangunan (International Rivers, 2013).

Teresa Rehman (2013) juga menyampaikan bahwa pembangunan bendungan-bendungan di Sungai Brahmaputra juga memiliki dampak yang buruk terhadap lingkungan ekosistem di sekitar bendungan, utamanya terhadap flora dan fauna unik serta manusia yang bergantung atas kekayaan alam Sungai Brahmaputra. Hal ini tidak lepas dari kondisi Sungai Brahmaputra yang memiliki ekosistem unik yang hanya dapat ditemukan di dalam aliran sungai tersebut. Sehingga adanya proyek pembangunan bendungan dapat memberikan dampak yang negatif terhadap eksistensi dari flora dan fauna endemik yang ada di Sungai Brahmaputra.

Walaupun terdapat konflik kepentingan serta kompetisi dalam pemanfaatan Sungai Brahmaputra, India terus berusaha untuk mendorong kerja sama dalam pengelolaan sungai tersebut dengan Tiongkok. Ketertarikan India tersebut terlihat dari kunjungan Perdana Menteri India pada saat itu, yaitu Manmohan Singh ke Tiongkok pada tahun 2013 yang menghasilkan MOU untuk memperkuat kerja sama kedua negara dalam pengelolaan Sungai Brahmaputra (Hussain, 2013). Dalam MOU tersebut terdapat poin penting yang menunjukkan arah kerja sama dari India dan Tiongkok yang sama-sama berkeinginan untuk memperkuat kerja sama yang sudah terjalin sebelumnya melalui adanya dialog yang membahas kepentingan bersama dari kedua negara (Kementerian Hubungan Luar India, 2013). Namun kerja sama kedua negara harus terhenti dikarenakan konfrontasi yang terjadi antara India dan Tiongkok di dataran Doklam.

Konfrontasi Doklam antara militer India dan Tiongkok sendiri merupakan sebuah konfrontasi yang dapat dianggap unik. Doklam merupakan sebuah dataran tinggi yang termasuk ke dalam wilayah Bhutan tetapi dipersengketakan oleh Tiongkok. Konfrontasi militer antara India dan Tiongkok dipicu oleh pihak Tiongkok yang berusaha untuk melakukan aktivitas di Doklam, yang merupakan wilayah sengketa antara Bhutan dan Tiongkok. *People's Liberation Army* (PLA) berusaha untuk masuk dari wilayah Tiongkok menuju Bhutan dengan mesin konstruksi jalan untuk membangun jalan untuk kendaraan bermotor yang menghubungkan Lembah Chumbi dan Dataran Doklam (Bardalai, 2018). Aktivitas ini membuat India yang mendukung klaim Bhutan untuk mengirimkan tentaranya yang ditempatkan di Sikkim agar segera menghentikan aktivitas tantara Tiongkok di wilayah yang dipersengketakan (Kaur & Dhiman, 2018). Kedua negara pada akhirnya sepakat untuk menarik pasukan mereka dari Doklam pada bulan Agustus 2017, walaupun tidak berujung kepada konflik bersenjata, krisis di Doklam memberikan dampak yang sangat besar terhadap hubungan diplomatis India dan Tiongkok.

Konfrontasi di Doklam berujung kepada penghentian laporan hidrologi dari Tiongkok kepada India sejak Juni 2017. Padahal laporan hidrologi di Sungai Brahmaputra sangatlah penting untuk India, terutama di musim panas karena adanya peningkatan debit air akibat mencairnya salju di area Tibet yang bisa menciptakan banjir, seperti yang pernah terjadi di Arunachal Pradesh dan Assam pada tahun 2000 akibat rusaknya bendungan alami anak Sungai Brahmaputra serta minimnya informasi hidrologi dari Tiongkok sebagai negara riparian atas (Yasuda et al., 2017). Sehingga laporan tersebut sangatlah penting dalam memprediksi ada atau tidaknya potensi bencana banjir yang dapat terjadi di Sungai Brahmaputra, terutama setelah proyek pembangunan bendungan Tiongkok.

Pemberhentian laporan hidrologi oleh Tiongkok di Sungai Brahmaputra pada akhirnya menimbulkan keresahan bagi India. Menteri Sumber Daya Air Tiongkok, Chen Lei, beralasan bahwa pemberhentian tersebut dikarenakan stasiun pengukuran data tersebut rusak dan harus diperbarui yang berdampak kepada

terhentinya penyediaan laporan hidrologi (Chaudary & Mangi, 2020). Namun di saat yang sama Menteri Sumberdaya Air Bangladesh, Anisul Islam Mohammad, menyebutkan bahwa negaranya terus menerima laporan hidrologi Sungai Brahmaputra dari Tiongkok (BBC, 2017). Joydeep Gupta (2018) menyimpulkan bahwa pemberhentian data tersebut berkaitan dengan konfrontasi selama 73 hari yang terjadi di Doklam. Fakta ini menunjukkan adanya keengganan dan ketidakpastian dari Tiongkok dalam melanjutkan kerja sama di Sungai Brahmaputra.

Setelah berhenti sejak Juni 2017, kerja sama antara India dan Tiongkok pada akhirnya kembali berlanjut pada melalui penandatanganan MOU pada tanggal 9 Juni 2018. Namun ada yang berbeda dari MOU tersebut, pemerintah Tiongkok juga sepakat untuk melakukan impor beras non-basmati dari India untuk menyelesaikan permasalahan defisit perdagangan yang dialami India di Tiongkok (The Times of India, 2018). Hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan hubungan antara India dan Tiongkok serta keseriusan kedua negara tersebut dalam mengelola Sungai Brahmaputra secara bersama-sama. Kelanjutan kerja sama India dan Tiongkok di Sungai Brahmaputra menjadi menarik untuk dibahas setelah adanya konfrontasi Doklam serta adanya upaya Tiongkok untuk memperkuat posisinya di Sungai Brahmaputra.

Namun terlepas dari semua permasalahan yang ada, kedua negara tidak terlibat dalam perang air, malahan India tetap melanjutkan kerja samanya dengan Tiongkok di Sungai Brahmaputra. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya motif khusus dari India yang harus tetap bekerja sama dengan Tiongkok untuk mengamankan aliran air sungai lintas-batas tersebut. Motif tersebut selanjutnya memiliki kaitan yang kuat terhadap keberlangsungan kerja sama antara kedua negara dalam pengelolaan Sungai Brahmaputra.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti menetapkan rumusan masalah yaitu mengapa India kembali melanjutkan kerja sama di Sungai Brahmaputra dengan Tiongkok pasca berhentinya kerja sama kedua negara akibat Konfrontasi Doklam?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis alasan India yang memilih untuk kembali melanjutkan kerja sama dengan Tiongkok di Sungai Brahmaputra, setelah sebelumnya sempat terhenti pasca krisis di Doklam di tahun 2017 hingga 2018.

1.4. Tinjauan Pustaka

Peneliti telah meninjau literatur-literatur yang berkaitan dengan kerja sama India dan Tiongkok di Brahmaputra. Brahma Chellaney (2009) menjelaskan bahwa upaya Tiongkok untuk membangun bendungan, *barrages*, dan kanal di Sungai Brahmaputra merupakan upaya-upaya untuk menjadikan sungai tersebut sebagai senjata dalam perang, bahkan penolakan data hidrologi di musim yang penting dapat diartikan sebagai penggunaan air sebagai alat politik. Situasi ini juga diperparah dengan kondisi Tiongkok yang tidak pernah memiliki perjanjian pembagian air atau trakta kerja sama dengan *co-riparian* lainnya. Selama ini Tiongkok hanya melakukan kerja sama bilateral melalui kesepakatan seperti penyediaan data hidrologi, proyek pencegahan banjir, serta MOU yang tidak mengikat (Chellaney, 2014). Sehingga sebetulnya tidak ada perbedaan antara ada atau tidaknya kerja sama di Sungai Brahmaputra serta dampaknya terhadap kepentingan India.

Selanjutnya Madeline Lovelle (2016) menyatakan bahwa Sungai Brahmaputra merupakan salah satu sungai yang penting bagi India dan Tiongkok. Kedua negara saat ini mengalami krisis air yang disebabkan oleh perubahan iklim, meningkatnya jumlah populasi, serta urbanisasi yang semakin meningkatkan tekanan dari kelangkaan air. Hal ini membuat aliran Sungai Brahmaputra menjadi salah satu sumber daya air utama untuk memenuhi kebutuhan air tersebut yang selanjutnya mendorong kedua negara untuk saling mengamankan aliran air dari sungai tersebut melalui pembangunan bendungan seperti yang dilakukan Tiongkok.

Upaya eksploitasi sungai lintas-batas yang dilakukan Tiongkok selanjutnya memiliki konsekuensi terhadap India. Terjadinya banjir bandang pada tahun 2000

di Arunachal Pradesh akibat pecahnya bendungan di Tibet menjadi sebuah titik balik dari kerja sama di Sungai Brahmaputra. Adanya upaya untuk mengamankan kepentingan air masing-masing yang tidak diimbangi oleh kerja sama air yang mumpuni dapat berdampak terhadap bencana banjir yang tiba-tiba saja bisa terjadi (Lovelle, 2016). Sehingga diperlukan adanya kombinasi antara kerja sama bilateral dan kepemimpinan yang kuat dengan manajemen permintaan-penyediaan untuk mengurangi potensi konflik India dan Tiongkok.

Yan Feng, Wenling Wang, dan Jiang Lu (2019) juga menjelaskan bahwa kerja sama di Sungai Brahmaputra merupakan bentuk kerja sama yang bersifat komplimenter dalam kaitannya dengan hubungan India dan Tiongkok dikarenakan adanya perebutan wilayah dan sifat saling mencurigai antara kedua negara. Selain itu perkembangan kerja sama di sungai tersebut sangatlah lambat dan hanya meliputi fokus yang sempit, padahal kerja sama tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 18 tahun. Hal ini tidak terlepas dari keengganan Tiongkok untuk meningkatkan kerja sama di Sungai Brahmaputra, padahal pihak India sendiri telah berusaha semaksimal mungkin agar terwujudnya perjanjian air atau mekanisme bersama dalam pembagian sungai lintas-batas.

Dalam tulisannya, Yasuda et. al (2017) menyampaikan bahwa jika dikomparasikan dengan kerja sama bilateral yang dilakukan oleh Tiongkok di sungai lain seperti di Mekong, kerja sama di Sungai Brahmaputra sudah cukup untuk menanggulangi permasalahan yang ada karena sungai tersebut memiliki populasi yang tidak banyak dengan pembangunan yang terbatas. Selain itu, kerja sama tersebut dapat dianggap efektif karena tidak terpengaruh oleh perebutan wilayah antara India dan Tiongkok. Namun Partha Jyoti Das (2013) menjelaskan bahwa dengan menggunakan perspektif yang lebih positif dan progresif, setiap konflik yang terjadi dapat memberikan kesempatan untuk kerjasama bilateral atau multilateral. Kerja sama tersebut akan menjadi dasar dari insitusi multilateral yang memiliki pengetahuan komprehensif dan holistik sungai atas aspek-aspek penting dalam hal fisik, biologi, lingkungan, dan sosio-ekonomi.

Berdasarkan literatur-literatur diatas, peneliti menemukan pandangan dan posisi yang berbeda dari peneliti-peneliti sebelumnya. Peneliti-peneliti sebelumnya membahas kerja sama di Sungai Brahmaputra bersifat melengkapi relasi India dan Tiongkok. Sementara peneliti melihat bahwa kerja sama di Sungai Brahmaputra merupakan suatu hal yang niscaya bagi India untuk memastikan keamanan airnya. Sehingga peneliti menggunakan konflik air serta teori rasionalitas air sebagai kerangka berpikir untuk membutuhkan hal tersebut.

1.5. Kerangka Berpikir

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah penelitian yang telah disebutkan dibahas sebelumnya, peneliti kemudian menggunakan dua konsep untuk menjelaskan alasan kerja sama antara India dan Tiongkok di Sungai Brahmaputra, yaitu Konflik Air, Teori Rasionalitas Air, dan De-sekritisasi.

1.5.1. Konflik Air

Air merupakan salah satu sumber daya strategis yang penting untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kondisi ini tidak terlepas dari pentingnya sumber daya air untuk segala aspek kelangsungan dari suatu negara, mulai dari kebutuhan biologis hingga ekonomis (Wolf, 1999). Namun di beberapa tempat sumber air tidak hanya berada di dalam satu wilayah negara saja, melainkan mengalir melewati wilayah perbatasan dari dua negara. Sehingga dalam beberapa kasus, sumber daya air tersebut, seperti sungai, seringkali diidentikkan dengan konflik dan perang air (Wolf, 1999).

W. J. Cosgrove (2003) menyebutkan bahwa konflik atas air dapat terjadi akibat pengaruh dari tiga bidang; hydrosfer, ekonomi, dan politik. Terdapat potensi konflik yang kuat antara kebutuhan ekosistem dan manusia terhadap air, bahkan dalam konteks kebutuhan manusia, konflik atas air seringkali dipengaruhi oleh permasalahan ekonomi dan politik seperti yang diakibatkan oleh bidang air. Kondisi ini juga serupa dengan yang terjadi dalam konteks hidrosfer yang dapat memicu konflik antara dua bidang lainnya. Sehingga ketiga bidang tersebut memiliki pengaruh atas satu sama lainnya serta sulit untuk dipisahkan.

Konflik air memiliki kaitan yang erat dengan keamanan air. Keamanan air menurut Schultz dan Uhlenbrook (2007) berkaitan dengan penggunaan secara berkelanjutan serta perlindungan sistem air dari bencana alam yang berkaitan dengan air (seperti banjir dan kekeringan) serta perlindungan atas pengembangan dan akses dari penggunaan air untuk kebutuhan manusia dan lingkungan. Selain itu, intervensi manusia juga dapat mengancam keamanan air, terutama dalam kasus sungai lintas-batas. Sehingga ancaman terhadap keamanan air dapat memicu munculnya konflik antara negara.

Namun kenyataannya, situasi persengketaan atau konflik air tidak selalu sedramatis itu hingga mampu berakhir dengan peperangan antar-negara. Wolf (1999) menjelaskan bahwa kekerasan yang terjadi serta berkaitan dengan air itu memang betul adanya, tetapi disaat yang bersamaan hal tersebut hanya terjadi di tingkatan subnasional, umumnya antara suku, penggunaan air, atau provinsi seperti yang terjadi antara pendatang Eropa dan penduduk pribumi Amerika. Hal ini menunjukkan bahwa persengketaan air memiliki kesempatan yang kecil untuk memicu terciptanya peperangan antara negara karena keamanan tersebut hanya bertahan dalam waktu yang singkat serta berpotensi untuk merusak kelangsungan dari sumber daya air lintas-batas itu sendiri.

1.5.2. Teori Rasionalitas Air

Rasionalitas air merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa suatu negara akan memilih untuk memastikan kelangsungan keamanan suplai air bersih melalui pengelolaan yang bijaksana sumber daya air nasional serta membangun relasi yang baik dengan negara co-riparian lainnya (Alam, 1998). Kompetisi antara negara riparian seringkali diakibatkan oleh upaya untuk melakukan sekuritisasi terhadap sumber daya strategis, dalam kasus ini air sungai lintas-batas, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga energi alternatif di sepanjang aliran sungai. Pengembangan secara cepat di tingkat domestik ataupun luar negeri dapat mengancam keamanan air dalam jangka panjang hanya untuk suplai dalam waktu singkat, atau disebut sebagai Irasionalitas Air (Alam, 1998). Sehingga berdasarkan teori rasionalitas air, kebijakan yang paling sesuai adalah kerja sama,

bahkan antara negara yang saling bermusuhan untuk menjamin keamanan dan kelangsungan aliran air yang berkualitas di sungai lintas-batas.

Teori tersebut muncul sebagai sebuah anti-tesis terhadap argumentasi perang-air yang dapat muncul dalam kasus keamanan air lintas-batas. Eksistensi dari sumber daya air lintas-batas sering dikaitkan dengan jumlah air yang terbatas dan keamanan air bagi masing-masing negara. Sehingga dalam upaya untuk mengamankan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, negara-negara di sepanjang aliran dapat terlibat dalam konflik air berkepanjangan.

Fakta ini menunjukkan bahwa ekspektasi munculnya konflik internasional akibat kompetisi memperebutkan air selama ini tidaklah tepat. Hal ini mendorong teori rasionalitas air untuk membawa ekspektasi yang berbeda bahwa kompetisi antara negara dalam memperebutkan sumber daya air pada akhirnya bisa menciptakan kerja sama antara pihak-pihak yang bertikai. Alam (1998) menjelaskan bahwa untuk mengamankan keamanan air dalam jangka waktu yang panjang, negara akan melakukan kerja sama karena jika dibandingkan dengan penggunaan perang, maka keamanan yang didapatkan sangatlah terbatas dan tidak mampu untuk bertahan lama. Wolf (1999) juga menjelaskan bahwa perang air secara strategis tidaklah rasional, efektif secara hidrologis, atau layak secara ekonomi yang selanjutnya akan mencegah negara-negara untuk berperang dan pada akhirnya akan mendorong negara-negara untuk melakukan kerja sama.

Kerja sama air hingga saat ini belum memiliki definisi tunggal yang disepakati oleh para ahli. Salah satu definisi kerja sama air yang dapat digunakan adalah suatu bentuk kerja sama yang tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa terdapat banyak aliran sungai yang lintas-batas, dan satu-satunya cara untuk menjamin keuntungan dari aliran tersebut adalah dengan bekerja sama untuk mengelola sumber daya air tersebut daripada memanfaatkannya untuk kepentingan komunitas serta negara riparian masing-masing (Schmeier, 2018). Rosa Cuppari (2017) mendukung pendapat tersebut dengan mendefinisikan kerja sama air sebagai pengaturan secara sukarela dari dua atau tiga pihak yang saling

memberikan keuntungan daripada berkompetisi untuk memperebutkan sumber daya air yang sama.

Pentingnya kerja sama air lintas batas disampaikan oleh Fransesco Sindico (2016) yang menjelaskan bahwa kerja sama air lintas batas sangatlah penting untuk pembangunan dunia berkelanjutan (SDGs) karena skala dari sungai itu sendiri serta adanya dampak negatif yang mungkin dapat ditimbulkan jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan air.

1.5.3. Teori De-Sekuritisasi

Permasalahan keamanan selama ini selalu dikaitkan dengan konflik bersenjata serta kekuatan militer. Sehingga konsep keamanan nasional klasik sangat berbeda dari konflik keamanan modern yang lebih luas dan bervariasi. Kondisi tersebut membuat pembahasan mengenai sekuritisasi semakin lama-semakin bergeser menjadi de-sekuritisasi untuk mengikuti perubahan zaman. De-Sekuritisasi merupakan sebuah proses dimana sebuah komunitas politik menurunkan tingkat atau berhenti memperlakukan suatu hal sebagai sebuah ancaman dari luar atas objek referensi bernilai dan mengurangi atau berhenti menyerukan langkah-langkah luar biasa untuk menangani ancaman tersebut (Buzan dan Waever, dalam Snetkov, 2017).

Tujuan utama dari teori de-sekuritisasi adalah untuk mengidentifikasi alasan dari bergesernya suatu isu dari lingkungan politik yang normal menjadi ancaman terhadap keamanan yang lebih dari politik normal, dan sebaliknya (Snetkov, 2017). Ole Waever (2000) membagi tiga strategi de-sekuritisasi, yaitu: tidak berbicara mengenai sebuah isu sebagai ancaman, mengatur sebuah sekuritisasi agar tidak meningkat, serta mengembalikan isu sekuritisasi kembali menjadi normal politik. De-securitisasi saat ini lebih identik dengan strategi yang terakhir, namun strategi pertama dan kedua harus diawasi dengan teliti (Edin, 2012).

1.6. Hipotesis

Berangkat dari kerangka pemikiran tersebut, peneliti menetapkan hipotesis bahwa konflik air yang terjadi di Sungai Brahmaputra mengancam keamanan air India.

Sehingga berdasarkan teori rasionalitas air, India harus terus melaksanakan kerja sama dengan Tiongkok untuk memastikan keamanan air dalam jangka panjang di sungai tersebut.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Definisi dan Operasionalisasi Konsep

1.7.1.1. Konflik Air

Penulis memahami konflik air sebagai salah satu jenis konflik yang timbul antar-negara akibat pemanfaatan sungai lintas-batas. Penelitian ini menggunakan tiga bidang yang disebutkan oleh W. J. Cosgrove (2003), yaitu: hidrosfer, ekonomi, dan politik. Ketiga bidang tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam konteks interaksi antara India dan Tiongkok di Sungai Brahmaputra yang memicu terjadinya konflik/persengketaan antara kedua negara. Ketiga bidang tersebut memiliki pengaruh yang kuat antara satu sama lainnya, tetapi dalam penjelasan nanti peneliti akan mengklasifikasikan isu-isu penting yang ada berdasarkan sifat yang paling menonjol.

1.7.1.2. Kerja Sama Air

Berdasarkan teori rasionalitas air, negara-negara riparian sungai pada akhirnya akan memutuskan untuk melakukan kerja sama demi menjamin keamanan suplai air dalam waktu panjang. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada kerja sama dalam pengelolaan sungai lintas-batas yang berkaitan dengan pengaplikasian sarana teknis untuk meningkatkan hasil dari aliran air yang lintas batas secara alami (Schmeier, 2018). Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa kerja sama di Sungai Brahmaputra antara India dan Tiongkok masih bersifat sempit dan terbatas pada isu-isu yang bersifat teknis. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kerja sama tersebut dapat terus berkembang dan meluas ke bidang-bidang lainnya.

1.7.1.3. Keamanan Air

Keamanan air meliputi penggunaan berkelanjutan dan perlindungan sistem air, perlindungan terhadap bencana yang berkaitan dengan air, pengembangan berkelanjutan atas sumber daya air, serta perlindungan atas akses air untuk fungsi

dan pelayanan air untuk manusia dan lingkungan (Schultz & Uhlenbrook, 2007). Fokus utama keamanan air dalam penelitian ini adalah pengembangan berkelanjutan atas sumber daya air yang berkaitan dengan aktivitas Tiongkok dalam memanfaatkan Sungai Brahmaputra yang berpotensi mengancam keamanan air India. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam penjelasan nanti, peneliti juga akan memasukan jenis keamanan lainnya jika memang diperlukan

1.7.1.4. De-Sekuritisasi

Dalam penelitian ini penulis berfokus terhadap strategi kedua dan ketiga de-sekuritisasi yang disampaikan oleh Ole Waever (2000) yaitu mengembalikan isu keamanan ke politik normal. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah India merespon aktivitas Tiongkok dengan rasional dan hati-hati serta berusaha sebisa mungkin untuk membuat masalah Sungai Brahmaputra sebagai permasalahan politik yang normal.

1.7.2. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian eksplanatif untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sebuah fenomena tertentu dengan mencari hubungan kausal, yang dalam hal ini adalah motivasi dari India untuk kembali melanjutkan kerja sama dengan Tiongkok dalam pengelolaan Sungai Brahmaputra. Penelitian ini mengacu pada teori yang sudah ada dengan tujuan untuk lebih dapat mengidentifikasi motif serta kaitannya terhadap kelangsungan kerja sama bilateral India dan Tiongkok dalam pengelolaan sungai tersebut.

1.7.3. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini memiliki jangkauan waktu dari penandatanganan MOU antara India dan Tiongkok pada tahun 2002 hingga 2018. Alasannya adalah karena MOU tersebut merupakan MOU pertama yang ditandatangani kedua negara yang secara khusus membahas mengenai Sungai Brahmaputra. Namun peneliti juga akan menggunakan data-data lain yang berkaitan dan bermanfaat untuk kepentingan penelitian.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui sumber primer dan sekunder. Adapun data primer diperoleh berdasarkan berita resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah India maupun Tiongkok, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, berita, serta penelitian lainnya yang berkaitan dengan subjek penelitian.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Dalam membuktikan hipotesis serta menjawab rumusan masalah, peneliti akan menggunakan teknik analisis kualitatif berdasarkan interpretasi data yang diperoleh mengenai topik penelitian. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis berdasarkan observasi atau studi literatur. Sehingga pada akhirnya penelitian ini dapat memberikan penjelasan mengenai topik penelitian dengan jelas mengenai situasi yang benar-benar terjadi di lapangan.

1.7.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab yang akan memberikan penjelasan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Bab Pertama akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, dan hipotesis peneliti. Bab Kedua merupakan studi literatur yang membahas mengenai dinamika hubungan bilateral India dan Tiongkok serta kerja sama yang dilakukan di Sungai Brahmaputra. Bab Ketiga akan membahas mengenai relevansi dari kerja sama di Sungai Brahmaputra terhadap keamanan air India. Terakhir, Bab Keempat merupakan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

KONFLIK BRAHMAPUTRA: ARTI STRATEGIS & POSISI GEOSTRATEGIS BAGI INDIA

India dan Tiongkok merupakan dua negara besar di Asia dengan peradaban tertua yang masih bertahan hingga saat ini (Arif, 2013). Sejarah besar dari kedua negara tersebut serta kondisi geografis yang berdekatan menjadikan hubungan India dan Tiongkok bersifat dinamis dan fluktuatif. Kedua negara telah mengalami perubahan yang dramatis dalam lima dekade penting, dimulai dari tahun 1950-an yang berlanjut ke permusuhan mendalam dari tahun 1960-an dan pendekatan kembali pada tahun 1980-an yang dilanjutkan dengan penyesuaian kembali pasca runtuhnya Uni Soviet (Arif, 2013).

2.1. Relasi India dan Tiongkok

India dan Tiongkok memiliki sejarah hubungan yang kompleks sejak berdirinya Tiongkok sebagai suatu negara, kondisi ini tidak terlepas dari persaingan India dan Tiongkok di Kawasan Asia Selatan. Pada awalnya India dan Tiongkok memiliki hubungan yang baik satu sama lainnya, bahkan ketika Tiongkok menganeksasi wilayah Tibet, Jawaharlal Nehru tetap memilih untuk menghadapi kasus ini secara diplomatis daripada konfrontasi terbuka untuk mempertahankan perdamaian di wilayah perbatasan India bagian Timur Laut (Arif, 2013). Strategi tersebut berhasil mempertahankan ketenangan di wilayah perbatasan India dengan Tiongkok selama hampir satu dekade sebelum kemudian memburuk dan berujung kepada perselisihan hingga konflik bersenjata di daerah perbatasan kedua negara.

Hubungan baik antara India dan Tiongkok mengalami perubahan yang serius pada tahun 1950-an. Kemunduran relasi tersebut diawali oleh perselisihan kedua pihak berkaitan dengan daerah perbatasan, Zhou Enlai menolak secara mentah-mentah Garis McMahon sebagai acuan akhir dalam menetapkan perbatasan antara India dan Tiongkok karena pihak otoritas Tibet tidak memiliki hak legal untuk menetapkan batas wilayah dengan pihak Inggris (Arif, 2013). Kondisi ini diperparah dengan keputusan Tiongkok untuk membangun jalan dari Sinkiang

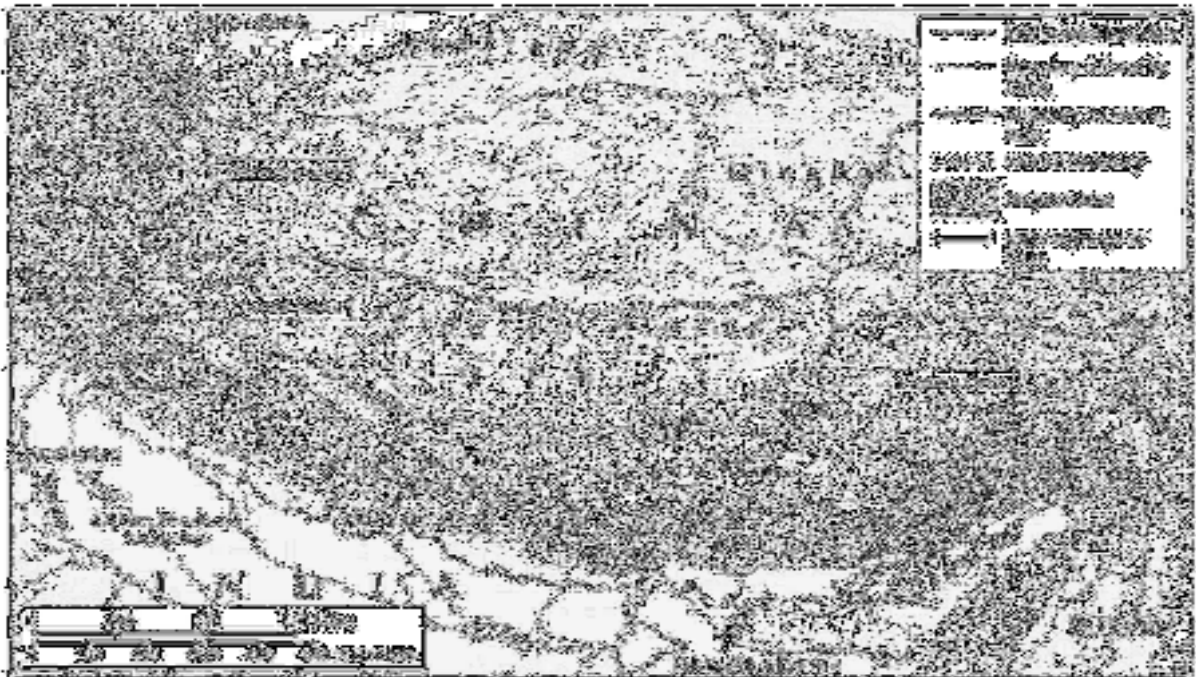
menuju Tibet dan melewati perbatasan India, sehingga pemerintah India merasa bahwa kedaulatannya semakin terancam di wilayah perbatasan (van Eekelen, 2015). Perselisihan tersebut selanjutnya terus berkembang menjadi konflik hingga pada akhirnya memicu perang antara India dan Tiongkok pada tahun 1962. Walaupun hanya berlangsung selama satu bulan, Perang India-Tiongkok tersebut pada akhirnya berdampak kepada memburuknya hubungan antara kedua negara.

Dalam upaya untuk mengakhiri perang, pihak India dan Tiongkok mulai memikirkan mengenai batas-batas yang baru. Batas yang baru tersebut selanjutnya dikenal sebagai Line of Actual Control (LAC) yang membentang sepanjang 4.057km antara Wilayah Otonomi Tibet milik Tiongkok yang berseberangan dengan tiga wilayah India, yaitu: Barat (Ladakh dan Kashmir), Tengah (Uttarakhand dan Himachal Pradesh) dan Timur (Sikkim dan Arunachal Pradesh) (One India, 2008). LAC disepakati sebagai bagian dari gencatan senjata informal antara India dan Tiongkok pasca perang di tahun 1962, sebelum kemudian diresmikan melalui perjanjian bilateral pada tahun 1993 (Bhonsale, 2018).

Hubungan antara India dan Tiongkok tidak mengalami perubahan yang signifikan setelah berakhirnya perang pada tahun 1962. Kedua negara kembali terlibat dalam konflik bersenjata di wilayah perbatasan, tepatnya di Nathu La dan Cho La pada bulan September dan Oktober 1967. M. Taylor Fravel (2008) menjelaskan setidaknya terdapat tiga alasan utama dari terjadinya konflik bersenjata tersebut: 1) Setelah kalah dari Tiongkok pada tahun 1962, India terus meningkatkan kekuatan militernya untuk meningkatkan penjagaan di wilayah perbatasan; 2) India menjadi lebih agresif dalam mempertahankan klaim atas wilayah di sekitar perbatasan dengan membangun pagar kawat yang kemudian memicu protes dan serangan dari pihak Tiongkok; 3) Tiongkok pada waktu itu sedang melalui periode Revolusi Kultural yang kemudian berdampak kepada hilangnya kendali dari pemerintah pusat. Meningkatnya tensi di daerah perbatasan serta tekanan dari India yang terus memperkuat klaim di wilayah perbatasan membuat tokoh-tokoh pemimpin Tiongkok semakin menguatkan persepsi ancaman dari India yang berujung kepada penggunaan kekerasan.

Konflik di Nathu La dan Cho La masing-masing berakhir pada 11 September dan 1 Oktober 1967. India pada akhirnya memenangkan konflik tersebut serta berhasil mempertahankan klaim atas wilayahnya, Willem van Eekelen (2015) juga menyebutkan bahwa kemenangan di Cho La secara spesifik berhasil meningkatkan moral India setelah berhasil memukul mundur pasukan Tiongkok hanya dalam waktu sehari. Relasi antara India dan Tiongkok pasca konflik di Nathu La dan Cho La relatif damai tanpa adanya perang besar yang terjadi atau pertempuran kecil di wilayah perbatasan (Thapliyal, 2018).

Gambar 2.1. Peta Persengketaan Wilayah India-Tiongkok



Sumber: M. Taylor Fravel (2008)

Pada tahun 1980, Perdana Menteri Indira Gandhi, atas usulan dari Jenderal Khrisna Rao, memutuskan untuk memperbarui rencana militer strategik India khususnya di wilayah perbatasan. Tujuannya adalah untuk mempercepat mobilitas pasukan dari Ladakh hingga ke perbatasan dengan Myanmar, dengan perhatian secara khusus ke Arunachal Pradesh, Sikkim Utara, dan Trans-Ladakh yang berbatasan dengan Tiongkok (van Eekelen, 2015). Rencana tersebut diprediksi

dapat selesai dalam kurun waktu 15 tahun termasuk untuk membangun jalan serta jalur komunikasi.

Namun belum lama setelah disetujui, hubungan antara India dan Tiongkok kembali memburuk. Pada tahun 1986, tentara Tiongkok memutuskan untuk mengambil pos pengawasan milik India di Lembah Sumdurong Chu dengan alasan bahwa India telah membangun pos pengawasan di zona netral antara Garis McMahon dan garis perbukitan tinggi, sehingga hal tersebut dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap wilayah perbatasan Tiongkok (Fravel, 2008). Pihak India dan Tiongkok selanjutnya terus menempatkan pasukan militer mereka di sekitar wilayah Sumdurong Chu yang berdampak kepada meningkatnya tensi antara kedua negara. Kondisi ini kemudian diperparah oleh keputusan India untuk menjadikan Arunachal Pradesh sebagai bagian dari negaranya yang kemudian di respon sangat negatif oleh Tiongkok (van Eekelen, 2015).

Dengan tensi yang terus meningkat, India dan Tiongkok menyadari bahwa jika perang bisa terjadi kapan saja. Dalam upaya untuk meredakan tensi serta melakukan normalisasi hubungan dengan Tiongkok, Menteri Pertahanan India, K.C. Pant melakukan kunjungan informal ke Beijing pada tahun 1987 setelah mengunjungi Korea Utara. Tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan pesan dari Perdana Menteri India pada saat itu, Rajiv Gandhi, bahwa India tidak memiliki keinginan untuk memperparah situasi yang ada (van Eekelen, 2015). Kedua negara pada akhirnya sepakat untuk meredakan tensi di wilayah perbatasan, hal ini juga diperkuat dengan kunjungan dari Rajiv Gandhi ke Beijing sebagai gestur bersahabat setelah kunjungan dari Zhou Enlai pada tahun 1960 (Fravel, 2008).

Kunjungan Rajiv Gandhi ke Beijing menjadi titik balik yang positif atas hubungan bilateral India dan Tiongkok. Van Eekelen (2015) menyebutkan bahwa Politik Luar Negeri India di bawah kepemimpinan Rajiv Gandhi mengalami perubahan yang signifikan dengan memprioritaskan hubungan yang baik dengan negara tetangga, utamanya Tiongkok. Dalam kunjungan Rajiv Gandhi pada Desember 1988, Deng Xiaoping menyampaikan “Tiongkok dan India sebaiknya melupakan

masa lalu yang tidak menyenangkan dan menetapkan pandangan ke masa depan” (Arif, 2013). Sehingga pertemuan tersebut menjadi dasar dari awal baru hubungan India dan Tiongkok yang memisahkan konflik perbatasan dengan urusan di bidang lainnya (van Eekelen, 2015).

Hubungan India dan Tiongkok pasca konflik tahun 1986 relatif lebih stabil serta mengalami kemajuan yang positif. Hal ini dibuktikan dengan adanya perjanjian antara kedua negara pada tahun 1993 dan 1996 yang mengatur tentang observasi terhadap LAC dan pembatasan jumlah tantara di sepanjang wilayah yang diperebutkan untuk mencegah adanya potensi konflik militer lokal (Fravel, 2008). Kedua negara juga mulai melakukan normalisasi hubungan dengan melakukan kerja sama perdagangan serta menandatangani Protokol Kerja Sama tahun 1997 dan Rencana Implementasi di Sungai Brahmaputra untuk tahun 2002 (Feng, Wang, & Liu, 2019).

2.2. Arti Strategis Kerja Sama di Sungai Brahmaputra Bagi India

India dan Tiongkok hingga tahun 2013 telah menandatangani empat MOU/kesepakatan yang berkaitan dengan pembagian sungai lintas-batas, empat diantaranya berkaitan langsung dengan Sungai Brahmaputra, yaitu: 1) MOU antara Kementerian Sumber Daya Air Tiongkok dan India tentang penyediaan informasi hidrologi Sungai Brahmaputra di musim banjir dari Tiongkok ke India tahun 2002; 2) Dibentuknya *Expert Level Mechanism* untuk isu-isu yang berkaitan dengan sungai lintas-batas tahun 2006; 3) MOU lanjutan tahun 2008 tentang penyediaan informasi hidrologi Sungai Yaluzanbu/Brahmaputra di musim banjir dari Tiongkok ke India pada periode 2008-2012; 4) MOU lanjutan tahun 2013 tentang penyediaan informasi hidrologi Sungai Yaluzanbu/Brahmaputra di musim banjir dari Tiongkok ke India pada periode 2013-2017. Selain itu juga terdapat MOU tentang Memperkuat Kerja Sama di Sungai Lintas Batas, yang ditandatangani oleh masing-masing Kementerian Sumber Daya Air India dan Tiongkok pada tahun 2013 (Feng, Wang, dan Liu, 2019).

Hubungan India dan Tiongkok di Sungai Brahmaputra diawali oleh bencana banjir di India bagian Timur Laut pada awal tahun 2000-an. Aktivitas Tiongkok di sungai tersebut sempat dicurigai sebagai penyebab terjadinya banjir tersebut, namun Ajit Kumar Panja, yang pada saat itu menjabat sebagai menteri negara bagian untuk urusan luar negeri, menjelaskan bahwa banjir tersebut merupakan sebuah fenomena alam dan pihak Tiongkok juga telah menjelaskan tidak adanya bendungan di wilayah mereka (Limaye, 2016).

India telah mencurigai aktivitas Tiongkok di Sungai Brahmaputra sebagai suatu upaya untuk merubah aliran sungai tersebut untuk keperluan domestik Tiongkok. Jonathan Holslag (2011) mencatat bahwa perkembangan isu aktivitas Tiongkok tersebut awalnya dimulai dari artikel Claude Arpi di *Rediff* pada tahun 2003 tentang potensi proyek besar di aliran atas sungai serta dampak negatifnya, yang kemudian dikembangkan menjadi suatu narasi oleh majalah populer India, *Outlook India*, bahwa pihak Tiongkok telah dengan sengaja membuat banjirnya Sungai Brahmaputra di Arunachal dan terlalu banyak alasan untuk percaya bahwa Tiongkok akan tetap merubah aliran sungai serta mengabaikan keberatan India. Kecurigaan ini semakin menguat dengan adanya laporan keamanan Tiongkok (*Chinese National Defense White Paper*) yang mencatat bahwa adanya kontribusi dari Kepolisian Tiongkok dalam 21 proyek pembangunan penting nasional, termasuk Proyek Pengalihan Air Selatan-Utara (Holslag, 2011).

Namun walaupun India memiliki kecurigaan yang mendalam akan aktivitas Tiongkok di aliran Sungai Brahmaputra bagian atas, India tetap memutuskan untuk melakukan kerja sama dalam pengelolaan sungai lintas-batas. Kerja sama antara India dan Tiongkok di sungai tersebut diresmikan dengan penandatanganan MOU mengenai penyediaan informasi data hidrologi Sungai Brahmaputra oleh Tiongkok kepada India pada saat musim banjir (dimulai dari tanggal 15 Mei hingga 15 Oktober) yang ditandatangani pada tahun 2002 dan berakhir pada tahun 2007 (Yasuda et al., 2017). Sesuai dengan MOU tersebut, pihak Tiongkok diharapkan dapat menyediakan informasi hidrologi yang meliputi ketinggian air, debit, serta curah hujan yang disampaikan secara berkala (Kementerian Jal Shakti-

Tabel 2.1. Proses Kerja Sama Sungai Lintas Batas India-Tiongkok

Tahun	Peristiwa	Kerja Sama Sungai Lintas Batas
1950	Dibangunnya hubungan diplomatis pada tahun 1950; kunjungan dari masing-masing Perdana Menteri pada tahun 1954.	Penyediaan data debit air pada tahun 1955, dan informasi hidrologi (debit, curah hujan, dan ketinggian air) pada tahun 1957.
1959	Konflik perbatasan dari tahun 1959 hingga 1962.	Pada tahun 1963, Tiongkok menghentikan penyediaan informasi hidrologi.
1984	Kesepakatan mengenai perdagangan pada tahun 1984. Perdana Menteri India mengunjungi Tiongkok pada tahun 1988	Pada tahun 1993, perjanjian mengenai kerja sama lingkungan ditandatangani; bersamaan dengan pengembalian hubungan India dan Tiongkok secara bertahap.
1997	Protokol Kerja sama.	Pada tahun 2002, MOU dan Rencana Implementasi di Sungai Yaluzangbu/Brahmaputra.
2003	Deklarasi tentang Prinsip Prinsip Hubungan dan Kerja Sama Komprehensif pada tahun 2003; Deklarasi Bersama pada tahun 2005.	MOU tahun 2005 dan Rencana Implementasi tahun 2008. Didirikannya <i>Expert Level Mechanism</i> (ELM) di Sungai Lintas-batas pada tahun 2006, dan Peraturan Kerja pada tahun 2008. MOU pada tahun 2008 dan Rencana Implementasi tahun 2010.
2010	Komunike Bersama.	MOU tahun 2010 dan Rencana Implementasi tahun 2011 tentang Sungai Langqen Zangbo/Sutlej.
2013	Deklarasi Bersama; Perjanjian tentang Kerja Sama Pertahanan Perbatasan.	MOU pada tahun 2013 dan Rencana Implementasi atas Sungai Yaluzangbu/Brahmaputra pada tahun 2013 dan 2014. MOU tentang Penguatan Kerja Sama dalam Sungai Lintas-batas pada tahun 2013.
2015	Deklarasi Bersama.	Pada tahun 2015, MOU atas Sungai Langqen Zangbo/Sutlej.
2017	Konfrontasi Doklam selama 73-hari	Pada tahun 2017, penyediaan informasi hidrologi dan pertemuan tahunan ELM India-Tiongkok terhenti.
2018	Pertemuan informal para pemimpin tingkat atas.	Pada tahun 2018, MOU dan Rencana Implementasi Sungai Yaluzangbu/Brahmaputra; pertemuan ke-11 ELM digelar; Tiongkok melaporkan informasi darurat tanah longsor di aliran utama menuju India.

Sumber: Yan Feng, Wenlin Wang, dan Jiang Liu (2019)

-India, 2017). MOU tersebut selanjutnya memiliki jangka waktu selama lima tahun dan diperbaharui dari waktu ke waktu.

Laporan hidrologi Sungai Brahmaputra yang dihimpun dan dilaporkan Tiongkok kepada India tidaklah diberikan secara cuma-cuma. Yasuda et al. (2017) menyebutkan bahwa pihak India mengeluarkan anggaran sebesar 850.000 Yuan (sekitar 1,8 milyar dalam Rupiah) setiap tahunnya sebagai biaya operasional (Limaye, 2016). Pengeluaran ini tidak lepas dari letak tiga pos yang mendokumentasikan laporan hidrologi di Sungai Brahmaputra, yaitu di Nugesha, Yangcun, dan Nuxi yang terletak di wilayah terpencil sehingga membutuhkan staf khusus untuk mengukur dan mencatat data hidrologi untuk dikirim ke India (Yasuda et al., 2017).

Membaiknya hubungan India dan Tiongkok secara perlahan juga berdampak positif kepada kerja sama kedua negara dalam hal sungai lintas batas. Pada saat kunjungan Presiden Tiongkok ke India pada tahun 2006, kedua negara sepakat untuk membentuk *Expert Level Mechanism* (ELM) untuk mendukung diskusi interaksi dan kooperasi dalam penyediaan data hidrologi di musim banjir, pengendalian bencana, serta isu lainnya yang berkaitan dengan sungai lintas-batas sesuai dengan kesepakatan (Kementerian Jal Shakti India, 2017). Mekanisme ini selanjutnya ditekankan kembali dalam MOU yang ditandatangani tahun 2013 tentang penguatan kerja sama di sungai lintas-batas yang dapat dicapai melalui ELM yang sudah ada, selain penyediaan data hidrologi dan pengendalian bencana (Yasuda et al., 2017).

Regulasi Pekerjaan ELM ditentukan pada pertemuan ELM tahun 2008 (Feng, Wang, & Liu, 2019). Berdasarkan regulasi tersebut, ruang lingkup pekerjaan dari ELM adalah “untuk mendiskusikan interaksi dan kerja sama dalam penyediaan data hidrologi di musim banjir, manajemen darurat, dan isu lain yang berkaitan dengan sungai lintas-batas sesuai kesepakatan”. Selain itu ELM juga bertanggung jawab untuk “memeriksa dan mendiskusikan isu-isu yang ada serta menyerahkan rekomendasi yang tepat kepada pemerintah masing-masing untuk memutuskan” ELM juga diwajibkan untuk mengadakan pertemuan setahun sekali; “dengan

agenda pertemuan yang telah diketahui sebelum pertemuan, dan kedua belah pihak tidak boleh memberitahukan informasi atau waktu pertemuan kepada pihak lain, kecuali telah mendapat persetujuan dari kedua pihak”. Sehingga secara umum ELM bertugas untuk menghubungkan pemerintah India dan Tiongkok sebagai organisasi pendukung yang membantu pemerintah dalam menentukan keputusan yang bersifat teknis dalam kerja sama sungai lintas-batas (Feng, Wang, & Liu, 2019). Walaupun demikian, ELM memiliki ruang lingkup pekerjaan yang terbatas dan pengaruhnya dibatasi oleh relasi diplomatik India dan Tiongkok.

MOU India dan Tiongkok yang disepakati pada tahun 2013 selanjutnya menjadi patokan terakhir dari kerja sama kedua negara di Sungai Brahmaputra (Kementerian Luar Negeri India, 2013). Terdapat lima poin penting dalam MOU tersebut, yaitu; Pertama, sungai lintas-batas beserta sumber daya alam dan lingkungan yang ada di dalamnya merupakan aset bernilai yang sangat penting bagi pengembangan sosio-ekonomis bagi semua negara riparian; Kedua, masing-masing pihak menyepakati bahwa kerja sama sungai lintas-batas akan memperkuat kepercayaan dan komunikasi strategis, serta memperkuat kerja sama strategis dan kooperatif. India dan Tiongkok juga mengakui pentingnya ELM di sungai lintas-batas yang melewati kedua negara; Ketiga, pihak India mengapresiasi Tiongkok yang telah menyediakan data hidrologi dan bantuan dalam mengatasi keadaan darurat; Keempat, pihak Tiongkok sepakat untuk memperpanjang penyediaan data Sungai Yaluzanbu/Brahmaputra, yang sebelumnya telah disepakati oleh Kementerian Sumber Daya Air India dan Tiongkok. Pihak India mengapresiasi pihak Tiongkok atas hal ini; Kelima, kedua pihak sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam sungai lintas-batas, bekerja sama melalui ELM dalam hal penyediaan data hidrologi di musim banjir dan penanggulangan keadaan darurat, serta saling bertukar pandangan berkaitan dengan isu-isu lain yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

MOU pada tahun 2013 memiliki arti penting dalam kerja sama sungai lintas-batas India dan Tiongkok. Hal ini dikarenakan MOU tersebut merupakan sebuah respon positif pemerintah Tiongkok terhadap kekhawatiran pihak India atas proyek

pembangunan bendungan di Sungai Brahmaputra (Hussain, 2013). Rencana pembangunan bendungan Zangmu pada tahun 2008 tersebut ditakutkan berpotensi untuk menimbulkan banjir bandang serta tanah longsor di wilayah India. Sehingga dalam MOU tersebut India juga diizinkan untuk meminta data yang berkaitan dengan bendungan yang sedang dibangun oleh Tiongkok di Sungai Brahmaputra untuk meredakan tensi yang ada (Ranjan, 2013).

Namun hal tersebut tidak dapat menghilangkan kecurigaan yang dimiliki oleh India terhadap aktivitas Tiongkok. Pihak India juga berspekulasi bahwa proyek pembangunan bendungan Tiongkok bukan hanya untuk keperluan energi Tiongkok melainkan juga untuk merubah aliran air Sungai Brahmaputra (Lovelley, 2016). Spekulasi India tersebut dibuktikan dengan adanya rencana dari pihak Tiongkok untuk membangun terowongan sepanjang 1.000 Kilometer dari Tibet menuju Xinjiang untuk membawa air dari Sungai Brahmaputra untuk menyuburkan wilayah yang sebagian besar adalah padang gurun (Chen, 2017). Rencana tersebut memiliki dampak yang negatif terhadap ekosistem Sungai Brahmaputra secara keseluruhan. Proyek tersebut dapat mengurangi aliran air hingga 60% serta berpotensi untuk mencemari lingkungan yang akan mengancam kehidupan masyarakat serta makhluk hidup lainnya yang bergantung dengan Sungai Brahmaputra (Lovelley, 2016). Amit Ranjan (2013) bahkan menyimpulkan bahwa aktivitas Tiongkok di Sungai Brahmaputra tersebut dapat berdampak buruk terhadap keamanan air dan pangan India, khususnya di bagian Timur Laut yang dilewati oleh aliran sungai tersebut.

Fan Xiao (2018) menyimpulkan bahwa proyek tersebut bisa dipastikan gagal terlepas dari usaha Tiongkok akibat beberapa alasan, yaitu biaya yang sangat tinggi, medan yang sangat sulit, ancaman lingkungan yang sangat tinggi, serta adanya kemungkinan bahwa suplai air yang didapatkan tidaklah cukup untuk memenuhi proyek tersebut. Jika proyek tersebut tetap dilanjutkan, Tiongkok kemungkinan akan gagal dalam mewujudkan ambisinya tersebut. Sehingga pada akhirnya akan mengalami kerugian baik secara materi maupun non-materi. Walaupun demikian, hingga tahun 2017 pihak Tiongkok tetap berencana untuk

melanjutkan proyek pembangunan terowongan serta penyuburan Xinjiang tersebut.

2.3. Dampak Konfrontasi Doklam Terhadap Kerja Sama India-Tiongkok

Setelah lebih dari 20 tahun berusaha untuk memperbaiki hubungan, India dan Tiongkok tidak mampu untuk mengurangi kompetisi mereka dalam upaya untuk mempengaruhi kawasan Asia Selatan (Kalyanaraman & Ribeiro, 2017:56). Terjadinya konfrontasi militer antara India dan Tiongkok di Doklam pada tahun 2017 merupakan sebuah kemunduran besar bagi kondisi hubungan kedua negara serta perdamaian di kawasan Asia Selatan. Walaupun tidak sampai berujung kepada konflik bersenjata hingga jatuhnya korban jiwa, tetapi tingginya tensi antara kedua belah pihak yang dibuktikan dengan penambahan jumlah personel bersenjata di wilayah perbatasan menunjukkan bahwa terdapat persaingan yang sangat kentara diantara kedua negara.

Dataran Doklam pada dasarnya merupakan sebuah wilayah yang disengketakan oleh Bhutan dan Tiongkok. Kedua negara mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari negara mereka berdasarkan interpretasi dari masing-masing pihak atas Konvensi Kalkuta pada tahun 1890 yang menentukan batas antara Sikkim dan Tibet (Kaur & Dhiman, 2018). Namun pada tanggal 16 Juni 2017, Tentara PLA Tiongkok berusaha untuk membangun jalan bagi kendaraan bermotor untuk menghubungkan Lembah Chumbi dan Dataran Doklam (Bardalai, 2018). Upaya tersebut selanjutnya menimbulkan reaksi dari Bhutan yang menganggap bahwa aktivitas tersebut mengancam klaimnya atas wilayah tersebut, sehingga pada akhirnya Bhutan meminta bantuan dari India untuk menghalangi upaya tersebut atas dasar perjanjian persahabatan kedua negara (Kalyanaraman & Ribeiro, 2017).

India pada akhirnya memutuskan untuk merespon positif permintaan bantuan dari Bhutan tersebut. Atas dasar semangat persahabatan dengan Bhutan, India mengirimkan tentara yang ditempatkan di Sikkim untuk masuk ke wilayah teritorial Bhutan untuk menghentikan pembangunan jalan oleh PLA dan menjaga *status quo* yang ada (Bardalai, 2018). Keputusan tersebut juga tidak terlepas dari

posisi geografis Dataran Doklam yang strategis dan berbatasan dengan Tiongkok dan India, sehingga India juga merasa terancam dengan pembangunan jalan dari PLA tersebut yang dianggap dapat memberikan kesempatan bagi tentara pihak Tiongkok untuk mengawasi wilayah India melalui jalan tersebut (Ahlawat & Hughes, 2018). Pasukan India selanjutnya bergerak menuju Doklam pada tanggal 18 Juni 2017 yang mengakibatkan meningkatnya tensi hubungan bilateral India dan Tiongkok (Menon & Kanisetti, 2018).

Keputusan India tersebut selanjutnya berujung kepada keputusan Tiongkok untuk menggunakan strategi “tiga peperangan”. Livermore (2018) menyampaikan bahwa Komisi Militer Pusat Tiongkok (CCMC) menyetujui penerapan strategi “tiga peperangan” yang tersusun atas penggunaan opini public/media, psikologi, serta legal yang digunakan secara bersamaan atau berkelanjutan. Ahlawat dan Hughes (2018) menjelaskan bahwa penggunaan strategi tersebut merupakan penerapan dari strategi Sun Tzu untuk memperoleh kemenangan tanpa perlu bertempur. Walaupun demikian, Tiongkok tetap mempersiapkan tentaranya untuk berjaga di wilayah Doklam.

Doklam pada akhirnya terbagi menjadi dua pihak antara pasukan India dan Tiongkok yang semakin menambah tensi hubungan antara kedua negara. Konfrontasi ini menjadi sebuah tantangan diplomasi yang besar bagi kedua negara, terutama untuk India yang kali itu berusaha untuk melindungi wilayah yang bukan miliknya (Kalyanaraman & Ribeiro, 2017). Tiongkok berusaha untuk menjelaskan bahwa pembangunan jalan tersebut dilakukan masih di dalam wilayah Tiongkok dengan memberikan bukti yaitu gambaran daerah perbatasan Tiongkok berdasarkan Konvensi Kalkuta tahun 1980 (Menon & Kanisetti, 2018). Lebih lanjut lagi Tiongkok juga melakukan serangan secara psikologis dengan mengingatkan pemerintah India atas kekalahan mereka pada tahun 1962, dengan ancaman bahwa kekalahan selanjutnya akan memiliki dampak yang lebih besar lagi (Ahlawat & Hughes, 2018).

India di sisi lain juga memberikan respon terhadap serangan-serangan media dan psikologis dari Tiongkok sekaligus juga untuk menjustifikasi keputusan yang berkaitan dengan Doklam. Alasan utamanya adalah bahwa klaim tiba-tiba dari Tiongkok atas wilayah Doklam merupakan suatu hal yang absurd dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pada tahun 2012 yang menyebutkan bahwa permasalahan perbatasan tiga negara yang bertemu (*trijunction*) lebih lanjut akan diselesaikan dengan konsultasi dari tiga negara yang bersangkutan (Menon & Kanisetti, 2018). Sehingga baik Bhutan maupun India tidak sepakat dengan keputusan sepihak dari Tiongkok untuk membangun jalan raya di Doklam.

Konfrontasi di Doklam bertahan hingga 28 Agustus 2017 dimana India dan Tiongkok sepakat untuk saling berkompromi (Menon & Kanisetti, 2018). Pemerintah India menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menarik pasukannya dari Doklam, sedangkan Tiongkok menyatakan bahwa situasi telah dapat dikendalikan dengan baik tetapi meninggalkan ruang untuk melanjutkan kembali aktivitasnya di wilayah tersebut (Kalyanaraman & Ribeiro, 2017). Walaupun Konfrontasi Doklam hanyalah pertempuran militer di tingkatan taktis, konfrontasi tersebut memiliki implikasi strategis, khususnya bagi hubungan India dan Bhutan, yang menunjukkan ketetapan India dalam melindungi statusnya di Asia Selatan (Bardalai, 2018).

Analisis dari para ahli menunjukkan adanya alasan khusus yang memicu konfrontasi di Doklam. Kalyanaraman dan Ribeiro (2017) menginterpretasi bahwa langkah Tiongkok untuk bergerak ke Doklam merupakan sebuah pola “memotong salami”, yang ditunjukkan oleh perebutan serta pendudukan wilayah sengketa hingga menimbulkan resistensi dari pihak yang lain. Tiongkok juga telah menggunakan strategi ini dalam kasus Laut Tiongkok Selatan, dengan tujuan untuk memastikan tercapainya kepentingan yang berkaitan dengan negara tetangga di sebelah selatan (Ahlawat & Hughes, 2018). Namun belakangan ini, Tiongkok hanya menggunakan strategi tersebut untuk merebut wilayah dari negara yang lebih lemah serta tidak dilindungi oleh kekuatan besar, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa Tiongkok tidak memprediksikan inisiatif India

untuk melakukan intervensi terhadap aktivitas PLA di Doklam dalam rangka untuk membela Bhutan.

Pemeriksaan lebih lanjut di dataran Doklam juga menunjukkan bahwa ada upaya yang disengaja dari Tiongkok untuk menguji kemampuan India. Bardalai (2018) menjelaskan bahwa Tiongkok sengaja menginisiasi Konfrontasi Doklam dengan tujuan untuk menyelidiki dan mengukur kekuatan dari India, untuk menyesuaikan kembali kemampuan bertahan Tiongkok dalam menghadapi kejadian serupa di masa depan. Pendapat ini didukung oleh Kaur & Dhiman (2018) yang menyimpulkan bahwa penentuan batas negara bukanlah satu-satunya masalah, melainkan juga sebagai upaya untuk menyesuaikan batas laut agar sesuai dengan kebijakan internasionalnya. Namun menurut Ahlawat dan Hughes (2018) pihak India lah yang secara sengaja mengirimkan pasukannya ke Doklam untuk menunjukkan kapasitasnya dalam menghadapi agresi Tiongkok. India sangat memperhatikan citra regionalnya, sehingga untuk menjaganya India harus menunjukkan kapabilitas negaranya untuk bertahan dalam menghadapi intervensi Tiongkok dan PLA.

2.4. Kelanjutan Kerja Sama India-Tiongkok di Sungai Brahmaputra

Meningkatnya tensi antara India dan Tiongkok pasca Konfrontasi Doklam pada akhirnya berdampak negatif terhadap kerja sama bilateral antara keduanya, termasuk dalam hal pengelolaan Sungai Brahmaputra. Pemerintah Tiongkok menghentikan pembagian laporan data Sungai Brahmaputra kepada India dimulai setidaknya pada tanggal 20 Agustus 2017 karena adanya peristiwa konfrontasi di Doklam (00.0, 2017). Selain penghentian laporan hidrologi secara berkala, Tiongkok juga menghentikan pertemuan ELM hingga waktu yang tidak ditentukan dan membuat kerja sama kedua negara di Sungai Brahmaputra berhenti (Feng, Wang, & Liu, 2019).

Pemberhentian laporan hidrologi dan kerja sama para ahli oleh Tiongkok membuat pemerintah India merasa semakin gelisah. Hal ini sebagian besar diakibatkan oleh pembangunan bendungan oleh Tiongkok di Sungai Brahmaputra

bagian atas yang membuat India semakin curiga akan adanya rencana Tiongkok yang akan merubah aliran sungai untuk memenuhi kebutuhan air di tingkat domestik, khususnya untuk irigasi (Wuthnow, 2018). Lebih lanjut lagi Wuthnow (2018) juga menyebutkan bahwa hal tersebut sangat mungkin terjadi, walaupun tidak diumumkan secara resmi, akibat adanya kelangkaan air yang menjadi tantangan bagi negara dengan jumlah populasi yang besar dan terus meningkat seperti Tiongkok.

Kondisi ini menunjukkan bahwa India dan Tiongkok saat ini terlibat dalam konflik dalam hal pemanfaatan sumber daya di Sungai Brahmaputra. Salah satu buktinya adalah pemberhentian laporan hidrologi sebagai bentuk politisasi sungai Tiongkok dalam upaya untuk melakukan diplomasi koersif terhadap India (Wuthnow, 2017). Hal ini juga mengkonfirmasi meningkatnya pendekatan non-militer Tiongkok dalam mewujudkan agendanya dalam konflik regional. Dengan kata lain, Tiongkok berusaha untuk menggunakan keuntungan geografis di Sungai Brahmaputra sebagai senjata politis dalam menghadapi tantangan India terhadap agenda Tiongkok di kawasan.

Pemberhentian tersebut membuat India semakin awas akan niatan Tiongkok serta kelanjutan kerja sama di Sungai Brahmaputra. Pemerintah India tetap berusaha untuk melakukan penilaian dengan tenang dan berhati-hati, tetapi masyarakat serta media massa India terus menyampaikan keprihatinan mereka atas isu di Sungai Brahmaputra (Limaye, 2018). Brahma Chellaney (2017) bahkan menganggap bahwa pemberhentian data dari Tiongkok merupakan salah satu upaya dari Tiongkok untuk mengurangi kemampuan India dalam memprediksi banjir yang dapat berakibat fatal terhadap masyarakat India di sepanjang sungai tersebut. Lebih lanjut lagi menurut Chellaney, Tiongkok berupaya untuk meningkatkan kedudukan politiknya melalui bendungan yang dibangun, dan penghentian laporan tersebut merupakan sebuah unjuk kekuatan untuk mengancam India atas intervensi India dalam kasus Doklam.

Satu Limaye (2018) juga mencatat bahwa kurangnya konsensus antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bagian timur-laut berdampak terhadap proses

penyelesaian masalah di Sungai Brahmaputra. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah daerah Assam yang menyalahkan Tiongkok atas pencemaran air yang terjadi di Sungai Brahmaputra akibat aliran Sungai Siang yang sudah tercemar serta aktivitas pembangunan bendungan Tiongkok (The Times of India, 2017). Perbedaan antara pihak-pihak internal India pada akhirnya menjadi sebuah tantangan dalam upaya untuk menormalisasi hubungan dengan Tiongkok.

Setelah berhenti selama beberapa bulan, India dan Tiongkok memutuskan untuk melakukan normalisasi hubungan di Sungai Brahmaputra. Pada tanggal 28 Maret 2018, kedua negara melangsungkan pertemuan ELM antara pejabat dari masing-masing Kementerian Sumber Daya Air untuk membahas kelanjutan kerja sama di Sungai Brahmaputra (Gupta, 2018). Kedua negara sepakat untuk menandatangani kembali MOU untuk melanjutkan kerja sama penyediaan informasi hidrologi dari Tiongkok ke India (Feng, Wang, & Liu, 2019). Pada akhirnya kelanjutan kerja sama di Sungai Brahmaputra tersebut menunjukkan membaiknya situasi hubungan antara India dan Tiongkok pasca Konfrontasi Doklam, tetapi tensi antara kedua negara tetap bertahan dan tidak dapat hilang dalam waktu dekat.

BAB III

KEUNTUNGAN & KERUGIAN INDIA

DALAM KONFLIK SUNGAI BRAHMAPUTRA

Dinamika politik India dan Tiongkok yang beberapa kali sempat terlibat dalam konflik menunjukkan bahwa kedua negara tersebut memiliki hubungan yang rentan dan tidak stabil. Iklim politik ini membuat kerja sama antara kedua negara tidak dapat berkembang dengan baik akibat adanya rasa curiga atau konflik yang muncul dan berdampak kepada penghentian kerja sama, termasuk dalam kasus Sungai Brahmaputra. Hal ini menunjukkan kerja sama dalam pengelolaan Sungai Brahmaputra antara India dan Tiongkok merupakan kerja sama yang terpaut dengan kondisi hubungan bilateral antara kedua negara, bukan sebagai suatu kerja sama yang berdiri sendiri dan tidak terpengaruh oleh dinamika hubungan diplomatik keduanya.

Namun kerja sama di Sungai Brahmaputra terus berlanjut walaupun sempat terhenti selama beberapa kali, seperti yang terjadi pasca Konfrontasi Doklam. Berlanjutnya kerja sama tersebut tidak terlepas dari kepentingan India, baik secara fisik maupun politis, untuk mengamankan suplai air di Sungai Brahmaputra. Sehingga sebagai negara riparian bawah, kerja sama dengan Tiongkok yang merupakan negara riparian atas menjadi sangat penting untuk mewujudkan keamanan air negaranya. Kendati memilih untuk tetap melanjutkan kerja sama, India tetap menghadapi permasalahan-permasalahan dalam pemanfaatan Sungai Brahmaputra yang sebagian besar dipengaruhi oleh aktivitas Tiongkok yang tetap berlangsung.

3.1. Ancaman Aktivitas Tiongkok terhadap Keamanan Air India di Sungai Brahmaputra

Fokus keamanan air India selama ini dibentuk untuk selalu mengacu kepada kebijakan Tiongkok (Limaye, 2018). Hal ini tidak lepas dari kondisi geopolitik Tiongkok yang menguasai Pegunungan Himalaya yang merupakan sumber aliran dari Sungai Brahmaputra. Himalaya dan Tibet merupakan benteng geografis alami

bagi India, siapapun yang mengendalikannya maka akan memiliki kuasa atas garis hidup India (Holslag, 2011). Sehingga walaupun India memutuskan untuk membangun kerja sama yang baik, aktivitas Tiongkok di Sungai Brahmaputra akan tetap memiliki konsekuensi terhadap keamanan air India, khususnya di daerah Assam dan Arunachal Pradesh yang dilalui oleh aliran sungai tersebut.

Berkaitan dengan rencana pembangunan bendungan pertama Tiongkok, Bendungan Zangmu pada tahun 2010 di Sungai Brahmaputra, pemerintah India mengeluarkan pernyataan resmi yang menunjukkan perspektifnya pada Juni 2011

“Recent reports about Chinese plans to construct a dam on the Brahmaputra and possibly divert the waters to Northern China are not new but based on previously known facts. It is a fact that China is constructing a dam at Zangmu in the middle reaches of the Yarlung Tsangpo (as the Brahmaputra is called in Tibet). We have ascertained from our own sources that this is a run of the river hydro-electric project, which does not store water and will not adversely impact the downstream areas in India. Therefore I (External Affairs Minister S. M. Krishna) believe there is no cause for immediate alarm. I would like to share with you the fact that a large proportion of the catchment of the Brahmaputra is within Indian territory.”

Sumber: Kementerian Luar Negeri India (2011)

Dalam pernyataan tersebut Pemerintah India menunjukkan respon yang netral dan tidak provokatif atas aktivitas Tiongkok dalam proyek pembangunan Bendungan Zangmu. Namun pasca beroperasinya bendungan Zangmu, pemerintah India menunjukkan kegelisahan akan masa depan keamanan air di Sungai Brahmaputra. Menteri Luar Negeri India, Shrimati Sushma Swaraj, dalam sesi tanya jawab dengan anggota parlemen Rajyasabha, Shri Neeraj Shekhar, menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil berkaitan beroperasinya Bendungan Zangmu pada tahun 2015 (Kementerian Luar Negeri, 2015):

“Government, in close cooperation with various State Governments including Government of Assam, which are users of the waters of river Brahmaputra, continues to carefully monitor the water flow in river Brahmaputra for early detection of abnormality so that corrective and preventive measures are taken to safeguard livelihood of peoples of these States of Union of India. ... India has urged China to ensure that the interests of downstream States are not harmed by any activities in upstream areas... The two sides agreed to further strengthen cooperation on the provision of flood-season hydrological data and emergency management, and exchange views on other issues of mutual interest through the Expert-Level Mechanism.

Sumber: Kementerian Luar Negeri India (2015).

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti berpendapat bahwa dengan menganalisis keamanan air serta kaitannya dengan kerja sama di Sungai Brahmaputra maka akan ditemukan motif India yang sebenarnya dalam melanjutkan kerja sama dengan Tiongkok. Peneliti selanjutnya menggunakan klasifikasi dari Cosgrove (2003) untuk mengidentifikasi jenis permasalahan mendasar yang dapat memicu atau meningkatkan intensitas konflik antara India dan Tiongkok di Sungai Brahmaputra, yaitu: 1) Ekonomi; 2) Hidrosfer; dan 3) Politik. Kendati demikian, ketiga klasifikasi tersebut memiliki keterkaitan satu sama lainnya dan bersifat saling mempengaruhi.

Peneliti berargumen bahwa ancaman di sektor irigasi yang terjadi karena aktivitas Tiongkok di Sungai Brahmaputra menjadi penyebab konflik air secara ekonomi antara India dan Tiongkok. Hal ini didasarkan pada pentingnya Sungai Brahmaputra bagi masyarakat India di Assam, karena situasi sosio-ekonomi masyarakatnya yang sangat bergantung dengan aliran dari sungai tersebut. Survei ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah India pada tahun 2014 menunjukkan bahwa sektor agrikultur dan sejenis menyumbang sebesar 23% dari total PDB Assam. Walaupun demikian, sektor agrikultur menyerap tenaga kerja paling

tinggi, yaitu lebih dari 60% populasi di Assam dan sektor tersebut juga mampu untuk menyokong kehidupan dari lebih 75 persen populasi di negara bagian tersebut (Nayak & Panda, 2016). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar populasi di Assam memiliki pekerjaan di sektor agrikultur dan bergantung kepada aliran Sungai Brahmaputra sebagai sumber aliran irigasi yang paling utama.

Penggunaan aliran Sungai Brahmaputra untuk irigasi di India sangatlah tinggi. Hal ini dibuktikan dengan jumlah penggunaan air (Tabel 3.1.) untuk irigasi yang mencapai 88 persen dari total penggunaan secara keseluruhan air Sungai Brahmaputra dan diperkirakan bahwa jumlah tersebut akan terus meningkat hingga tahun 2050 (Mahanta, C., et al., 2014). Namun dengan meningkatnya aktivitas Tiongkok di Sungai Brahmaputra, data tersebut dapat berubah dengan sangat mudah di luar perkiraan.

Rencana pengembangan Sungai Brahmaputra oleh Tiongkok untuk dijadikan sebagai sumber energi alternatif cenderung memiliki dampak yang negatif terhadap masyarakat India di sekitar aliran sungai. Organisasi petani Assam yang bernama Krishna Mukti Sangram Samiti (KMSS) menjelaskan bahwa pembangunan bendungan akan mempengaruhi aliran air sungai yang berdampak kepada naik-turunnya volume irigasi serta meningkatkan potensi banjir secara tiba-tiba di beberapa daerah (Rehman, 2013). Yang Yong (2013) juga menambahkan jika pembangunan bendungan secara masif yang dilakukan oleh Tiongkok dapat mengakibatkan terjadinya desertifikasi di Brahmaputra dan pada akhirnya mendesak orang-orang untuk meninggalkan desa karena hilangnya kesuburan tanah mereka.

Tabel 3.1. Permintaan Bersih & Kotor Aliran Air Sungai Brahmaputra di Tahun 2050

Sector	Gross Demand (MCM) ^a	Consumption (%)	Net Demand (MCM) ^a
Domestic water supply			
Rural, domestic	2.920	—	—
Rural, livestock	694	—	—
Total rural	3.614	50	1.807
Urban	1.533	30	459
Subtotal domestic (1)	5.147	—	2.266
Industrial (2)	5.147	20	1.060
Agricultural water supply			
Surface water	3.520	44	15.500
Irrigation groundwater	16.900	50	8.500
Subtotal agriculture (3)	52.100	—	24.300
Total (1+2+3)	62.394		27.630

Sumber: Mahanta, C., et al. (2014)

Peneliti menemukan bahwa ketergantungan India terhadap aliran Sungai Brahmaputra membuat aktivitas Tiongkok menjadi suatu hal yang berbahaya bagi kebutuhan irigasi India. Sektor pertanian India cenderung berlebihan dalam melakukan budidaya tanaman yang membuat India membutuhkan air irigasi dalam jumlah yang besar. Pengurangan debit air dari Sungai Brahmaputra dapat berujung kepada terjadinya gagal panen yang berdampak kepada instabilitas sosial

(Holslag, 2011). Lebih lanjut lagi, Jonathan Holslag juga menjelaskan bahwa instabilitas ini juga akan terjadi di Bangladesh yang akan berdampak terhadap meningkatnya kemiskinan, kekerasan, dan terjadinya migrasi ke negara lain, seperti India, yang akan menciptakan permasalahan sosial baru bagi India.

Permasalahan keamanan air India di Sungai Brahmaputra tidak berhenti sampai di permasalahan irigasi saja. Peneliti berargumen bahwa aktivitas Tiongkok di aliran Sungai Brahmaputra bagian atas juga memiliki konsekuensi terhadap bidang hidrosfer itu sendiri, yaitu pencemaran air yang mengalir menuju India. Argumen ini didasarkan pada tuduhan pemerintah negara bagian Assam yang menyalahkan Tiongkok atas terkontaminasinya salah satu anak Sungai Brahmaputra, yaitu Sungai Siang. Sungai Siang kini telah terkontaminasi dan berwarna hitam, dan dalam tes sampel Sungai Brahmaputra yang dilakukan di Tezpur ditemukan kandungan mineral dalam jumlah besar serta campuran semen di dalam air (The Times of India, 2017). Bukti ini menunjukkan bahwa aktivitas pembangunan bendungan yang dilakukan di aliran sungai bagian atas tersebut berpotensi atau bahkan telah mengkontaminasi aliran air yang mengalir ke India.

Kondisi ini menjadi permasalahan bagi populasi di Assam yang jumlahnya terus mengalami peningkatan. Jumlah populasi di tiga kota di Assam yang dilewati oleh Sungai Brahmaputra, yaitu Guwahati, Dibrugarh, dan Tezpur yang menunjukkan adanya peningkatan sekitar 20 persen dari jumlah populasi setiap tahunnya (Dutta, 2017). Meningkatnya jumlah populasi juga berdampak terhadap meningkatnya penggunaan air di tingkat rumah tangga. Peningkatan jumlah konsumsi air di tingkat rumah tangga juga berarti meningkatnya jumlah limbah air yang dihasilkan yang juga mengancam kelangsungan air dari Sungai Brahmaputra. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan kependudukan dan limbah yang dialami India akan diperburuk lagi dengan aktivitas Tiongkok yang juga mencemari Sungai Brahmaputra.

Meningkatnya kandungan polutan di Sungai Brahmaputra juga berdampak buruk terhadap ekosistem sungai tersebut. Rencana Tiongkok untuk membangun bendungan lain pada akhirnya akan membahayakan flora dan fauna yang ada di

sungai (Rehman, 2013). Bhattacharjya, Bhaumik, dan Sharma (2017) menemukan bahwa setidaknya terdapat 217 jenis ikan berbeda yang ada di Sungai Brahmaputra yang ada di Assam, termasuk lumba-lumba sungai (*Platanista gangetica*) yang merupakan mamalia endemik yang langka dan hanya bisa ditemukan di Sungai Gangga dan Brahmaputra.

Lumba-lumba sungai tersebut merupakan hewan langka yang sangat penting dalam menentukan status dari Sungai Brahmaputra. Jules Montague (2018) menjelaskan bahwa salah satu alasan dari langkanya lumba-lumba sungai adalah karena meningkatnya jumlah polusi di Sungai Brahmaputra yang berdampak kepada ekosistem di sungai tersebut. Sebagai hewan yang ada di puncak rantai makanan air, eksistensi dari lumba-lumba sungai menjadi sebuah pertanda dari kesehatan ekosistem dan biodiversitas di Sungai Brahmaputra. Kini, lumba-lumba sungai hanya berjumlah sekitar 1200 ekor di seluruh India, dan hanya 300 ekor diantaranya yang dapat ditemukan di Sungai Brahmaputra (Montague, 2018).

Tercemarnya Sungai Brahmaputra tidak hanya berdampak buruk terhadap kondisi ekosistem serta makhluk hidup yang tinggal di aliran sungainya, melainkan juga terhadap status sosio-ekonomi dari masyarakat yang tinggal di sekitar alirannya, seperti yang terjadi di Guwahati. Jumlah tangkapan ikan di Sungai Brahmaputra di sekitar Guwahati mengalami penurunan yang drastis, hal ini dibuktikan dari jumlah tangkapan ikan di musim dingin yang seharusnya hanya mencapai jumlah lima hingga 15kg per nelayan, padahal biasanya di musim yang sama seorang nelayan bisa mendapatkan tangkapan ikan sebanyak 30 hingga 45 kg (The Logical Indian, 2017). Padahal biasanya terjadi peningkatan aktivitas memancing di Sungai Brahmaputra karena aliran air sungai yang lebih tenang dibandingkan dengan musim panas.

Kepala Inisiatif Riset dan Konservasi *Gangetic Dolphin*, Abdul Wakid, menjelaskan kepada *Guwahati Plus* (2017) bahwa terjadi penurunan jumlah nelayan di Guwahati di musim dingin. Berdasarkan studi yang dilaksanakan, Abdul Wakid menemukan bahwa jumlah nelayan di Guwahati pada musim dingin hanya sekitar 10-15 orang dalam satu minggu, padahal berdasarkan data dalam

penelitian sebelumnya jumlah tersebut mencapai hampir empat kali lipatnya, yaitu sekitar 50-60 nelayan. Hal ini ditenggarai sebagai dampak dari terkontaminasinya Sungai Brahmaputra yang mengakibatkan menurunnya jumlah tangkapan ikan di sekitar Assam.

Menurunnya jumlah tangkapan ikan juga menjadi sebuah permasalahan lain bagi masyarakat Assam. Kondisi ini mengakibatkan kepada krisis ikan dan membuat harga ikan menjadi terlalu mahal di musim dingin (*Guwahati Plus*, 2017). Padahal sebelumnya jumlah tangkapan ikan di musim dingin sangatlah banyak dan lebih dari cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat. Salah satu petugas di Departemen Perikanan Assam menyebutkan bahwa saat ini Assam masih memiliki suplai ikan dari pemerintah, tetapi jika kondisi ini terus berlanjut suplai tersebut akan habis dan masyarakat harus bergantung kepada ikan beku dari Andhra Pradesh (*Guwahati Plus*, 2017).

Selain bidang hidrosfer dan ekonomi, aktivitas pembangunan bendungan yang dilakukan Tiongkok di Sungai Brahmaputra bagian atas juga berpotensi untuk menimbulkan permasalahan politik bagi India. Hal ini dikarenakan adanya resiko pelepasan air banjir di musim hujan yang akan memperburuk situasi banjir yang sudah terjadi di Assam (Bhattacharya, 2018). Banyaknya air yang dilepaskan oleh bendungan Tiongkok di musim hujan akan berpengaruh terhadap luas wilayah yang terkena dampak dari banjir. Sehingga dibutuhkan koordinasi yang sangat baik antara pemerintah Tiongkok dan India dalam hal pembagian laporan hidrologi untuk memprediksi ada atau tidaknya banjir yang akan terjadi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Sungai Brahmaputra sangatlah rentan terhadap perubahan musim yang dapat berakibat kepada terjadinya bencana banjir. Sejak tahun 2009, hampir setiap tahun Assam terkena bencana banjir, dan banjir pada tahun 2004 menjadi banjir terparah dengan mempengaruhi 28,5 juta hektar tanah, 12,3 juta orang, 12,57 juta hektar lahan pertanian, 10.560 desa, dan merenggut 251 jiwa manusia dan satwa yang tak terhitung jumlahnya (Nayak & Panda, 2016). *Northwest Hydraulics Consultants* (dalam Nayak & Panda, 2016) menyebutkan bahwa rata-rata banjir setiap tahunnya berdampak terhadap 0,8 juta

hektar tanah, dan dalam beberapa kasus mencapai lebih dari 4 juta tanah dari total 7,54 juta hektar tanah di wilayah Assam.

Peneliti menemukan bahwa aktivitas Tiongkok di Sungai Brahmaputra bagian atas berpotensi dalam meningkatkan potensi banjir adalah pada peristiwa bencana banjir di Assam pada tahun 2017. Terhentinya laporan hidrologi Sungai Brahmaputra oleh Tiongkok pasca Konfrontasi Doklam membuat pemerintah daerah Assam kebingungan dan tidak dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi banjir yang biasa terjadi di musim hujan (BBC, 2017). Pada akhirnya banjir yang terjadi di Assam pada tahun itu merupakan salah satu banjir yang besar yang menenggelamkan 2.734 desa di 21 distrik yang berdampak kepada hidup dari 2 juta orang yang menempatinya (Davies, 2017). Walaupun tidak ada bukti konkrit yang menunjukkan bahwa bendungan Tiongkok juga bertanggung jawab dalam bencana tersebut, tetapi faktor pemberhentian laporan hidrologi Sungai Brahmaputra juga turut berkontribusi atas ketidaksiapan Assam dan beberapa negara bagian utara India lainnya dalam menghadapi banjir tersebut.

Peneliti menemukan bahwa pembangunan bendungan yang dilakukan Tiongkok juga memiliki tujuan politik lain, yaitu untuk menjadikan aliran air sebagai senjata politik. Brahma Chellaney (2017) menyebutkan bahwa Tiongkok berupaya untuk meningkatkan status politiknya di Sungai Brahmaputra melalui pembangunan bendungan yang akan memberikan Tiongkok kuasa atas aliran sungai yang mengarah ke India. Hal ini sangatlah mungkin terjadi jika menilik ke 11 bendungan besar Tiongkok serta aktivitas yang dilakukan di Sungai Mekong yang berdampak kepada menurunnya debit air sungai tersebut di musim panas tahun 2019 ke titik yang paling rendah dalam 100 tahun terakhir (Chellaney, 2019). Kondisi tersebut selanjutnya berdampak kepada kekeringan yang terjadi di sepanjang aliran Sungai Mekong.

Peneliti berargumen bahwa Tiongkok memang berencana untuk menjadikan Sungai Brahmaputra sebagai sebuah senjata untuk melawan India. Hal ini dibuktikan dari keputusan sepihak Tiongkok yang menghentikan kerja sama di Sungai Brahmaputra pasca terjadinya konfrontasi di Doklam, Bhutan. Brahma

Chellaney (2017) menganggap bahwa pemberhentian kerja sama tersebut merupakan salah satu cara Tiongkok untuk menekan India serta mengurangi kemampuannya dalam mengetahui debit air serta curah hujan untuk memprediksi potensi banjir. Dengan kata lain, Tiongkok berusaha untuk menggunakan aliran Sungai Brahmaputra sebagai daya tawar tambahan untuk membuat India patuh agar tidak mengancam kepentingan Tiongkok di kawasan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menemukan bahwa konflik antara India dan Tiongkok di Sungai Brahmaputra sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas Tiongkok. Pembangunan Bendungan Zangmu serta beberapa bendungan lainnya yang telah direncanakan diperkirakan akan memberikan dampak yang negatif terhadap aliran sungai ke India, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kondisi ini berpotensi menciptakan instabilitas dalam hal lingkungan, politik, dan ekonomi yang benar-benar dirasakan oleh India serta secara pelan-pelan akan mengancam kerja sama kedua negara di sungai tersebut. Namun walaupun demikian kerja sama antara India dan Tiongkok tetap berlanjut. Keputusan ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa walaupun terancam oleh aktivitas Tiongkok, India harus tetap melanjutkan kerja sama tersebut untuk mengamankan keamanan air di Sungai Brahmaputra.

3.2. Keuntungan India dalam Kerja Sama dengan Tiongkok di Sungai Brahmaputra

Walaupun menghadapi berbagai ancaman sebagai dampak negatif atas aktivitas Tiongkok di hilir sungai, India juga mendapatkan beberapa keuntungan dari kerja sama bilateral dengan Tiongkok dalam pengelolaan Sungai Brahmaputra. Salah satu keuntungan awal yang diperoleh India adalah penyediaan laporan hidrologi oleh Tiongkok. Penyediaan laporan tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua negara melalui penandatanganan MOU pada tahun 2002 tentang penyediaan laporan hidrologi selama musim banjir yang terdiri dari ketinggian air, debit air, serta intensitas hujan secara teratur (Kementerian Jal Shakti, 2017). MOU ini selanjutnya diperbarui kembali setiap lima tahun sekali untuk melanjutkan kerja sama yang sudah ada.

Penyediaan laporan hidrologi dari Tiongkok merupakan suatu hal yang penting bagi India. Hal ini dikarenakan laporan hidrologi tersebut sangat bermanfaat bagi pemerintah India dalam memprediksikan bencana banjir yang dapat terjadi di sepanjang aliran Sungai Brahmaputra, mengingat sungai tersebut merupakan salah satu sungai yang rentan akan bencana banjir (Yasuda et al., 2017). Selain itu laporan hidrologi tersebut juga sangat penting bagi India karena dua hal yang utama, yaitu perubahan musim yang semakin meningkatkan intensitas hujan serta debit air sungai serta aktivitas pembangunan bendungan Tiongkok yang berpengaruh terhadap aliran sungai di bagian hilir. Sehingga penyediaan laporan akan memberikan gambaran bagi pihak India mengenai kondisi aliran sungai yang mengalir dari wilayah Tiongkok.

Penyediaan laporan hidrologi oleh Tiongkok selanjutnya mengalami perkembangan secara bertahap. Pada awalnya, penyediaan laporan hidrologi hanya dilakukan di musim banjir, tetapi hal tersebut berkembang menjadi laporan secara berkala selama setahun penuh dari pihak Tiongkok ke India dari tiga pos pengawasan, yaitu di Nugesha, Yangcun, dan Nuxi. Namun perkembangan ini juga menuntut India untuk membayar biaya perawatan serta operasional dari ketiga pos pengawasan tersebut setiap tahunnya sebesar 850.000 Yuan atau sekitar 1,8 milyar dalam Rupiah, yang sebelumnya disediakan secara cuma-cuma oleh Tiongkok hingga tahun 2010 (Limaye, 2016). Kendatipun demikian, bantuan dari Tiongkok dapat memberikan bantuan kepada India untuk dapat mengkalibrasikan prediksi atas banjir serta luas wilayah yang akan terdampak dari bencana tersebut.

Setelah memiliki MOU mengenai penyediaan laporan hidrologi, kerja sama tersebut selanjutnya berdampak terhadap pembentukan ELM. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ELM merupakan mekanisme kerja sama yang mempertemukan tenaga ahli dari India dan Tiongkok untuk membahas permasalahan yang bersifat teknis dan berkaitan dengan sungai lintas-batas, termasuk Sungai Brahmaputra dan membangun rasa saling memahami atas kepentingan masing-masing negara (Feng, Wang, & Liu, 2019).

Tabel 3.2. Publikasi dalam Kerja Sama Tentang Sungai Lintas Batas dalam Dokumen Resmi Bilateral

Tahun	Dokumen	Upaya dan Pencapaian Kerja Sama
1997	Protokol Kerja Sama	Untuk memfasilitasi pertukaran informasi antara kementerian masing-masing.
2003	Deklarasi tentang Prinsip Prinsip Hubungan dan Kerja Sama	Untuk bekerja dalam pertukaran data hidrologi di musim banjir di sungai bersama sesuai kesepakatan.
2005	Deklarasi Bersama	Untuk bekerja sama dalam pertukaran data hidrologi di sungai lintas-batas yang disepakati. Kedua belah pihak mengungkapkan kepuasan masing-masing atas penandatanganan MOU tentang penyediaan informasi hidrologi.
2006	Deklarasi Bersama	Untuk menyiapkan sebuah ELM untuk mendiskusikan kerja sama dalam sungai lintas-batas antara keduanya. Penyediaan data hidrologi yang berlangsung juga terbukti penting dalam memprediksi serta melakukan mitigasi terhadap bencana banjir.
2008	Sebuah Versi Bersama untuk Abad ke-21	Sebuah contoh bagaimana kerja sama dalam hal sungai lintas-batas sejak 2002 telah berkontribusi positif terhadap pembangunan kepercayaan dan pemahaman bersama. Pihak India sangat mengapresiasi bantuan Tiongkok yang diperpanjang dalam penyediaan data hidrologi di musim banjir yang telah memastikan keamanan masyarakatnya di sekitar sungai.
2010	Komunike Bersama	Untuk mempromosikan serta memperkuat kerja sama di bidang sungai lintas-batas. Kedua belah pihak mencatat kerja sama yang baik di bidang sungai lintas-batas. Pihak India mengapresiasi data hidrologi di musim banjir serta bantuan darurat dari Tiongkok.

2013	Deklarasi Bersama	Untuk memperkuat kerja sama lanjutan dalam hal sungai lintas-batas. Untuk bekerja sama melalui ELM dalam hal penyediaan data hidrologi di musim banjir dan manajemen darurat serta bertukar pandangan terkait isu kepentingan bersama. India mengapresiasi data hidrologi dan manajemen darurat yang diberikan oleh Tiongkok.
2013	Deklarasi Bersama dalam Pengembangan Visi Kemitraan Kooperatif yang Strategik	Untuk lebih memperkuat kerja sama, dalam ELM, penyediaan data hidrologi di musim banjir serta manajemen darurat, dan bertukar pandangan terkait isu kepentingan bersama. Sangat mengapresiasi sumber daya dan upaya yang dilakukan Tiongkok dalam menyediakan data serta manajemen darurat dalam sungai lintas-batas. Menerima dengan senang hati penandatanganan MOU berkaitan dengan memperkuat kerja sama di sungai lintas-batas.
2014	Deklarasi Bersama tentang Membangun Kemitraan yang lebih dekat untuk Pengembangan	Dalam lingkup ELM, untuk bekerja sama dalam penyediaan data hidrologi, manajemen darurat, pertukaran pandangan terkait isu kepentingan bersama. Pihak India mengapresiasi bantuan dari Tiongkok.
2015	Deklarasi Bersama	Untuk bekerja sama dalam penyediaan data hidrologi di musim banjir dan manajemen darurat, serta pertukaran pandangan terkait isu kepentingan bersama, dalam ELM. Pihak India mengapresiasi bantuan dari Tiongkok

Sumber: Yan Feng, Wenling Wang, dan Jiang Liu (2019).

Selain itu dibentuknya ELM juga untuk mendukung diskusi interaksi dan kooperasi dalam penyediaan data hidrologi di musim banjir, pengendalian bencana, serta isu lainnya yang berkaitan dengan sungai lintas-batas sesuai dengan kesepakatan (Kementerian Jal Shakti India, 2017). Berdasarkan Regulasi Pekerjaan ELM yang disepakati tahun 2008, ruang lingkup pekerjaan ELM adalah untuk mendiskusikan interaksi dan kerja sama dalam penyediaan data hidrologi di musim banjir, manajemen darurat, dan isu lain yang berkaitan dengan sungai

lintas-batas sesuai kesepakatan dan selanjutnya memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dari negara masing-masing sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan isu sungai lintas-batas (Feng, Wang, dan Liu, 2019). Sehingga jika disederhanakan, ELM bertugas untuk menghubungkan pemerintah kedua negara dan mendiskusikan suatu permasalahan tertentu untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah negara masing-masing yang berkaitan dengan isu sungai lintas-batas.

Walaupun tidak memiliki kekuatan untuk mengeluarkan kebijakan atau memberlakukan solusi, India masih menganggap ELM sebagai suatu mekanisme yang penting. Hal ini dikarenakan melalui ELM India dapat mendapatkan akses untuk berkomunikasi serta klarifikasi dari pihak Tiongkok yang berkaitan dengan segala aktivitas di hilir sungai. ELM sendiri juga dapat digunakan untuk melakukan normalisasi hubungan antara India dan Tiongkok pasca Konfrontasi Doklam, tetapi sayangnya hal tersebut tidak mampu terwujud setelah Tiongkok membatalkan pertemuan ELM (Limaye, 2018).

ELM juga selanjutnya memberikan bantuan lain bagi India, yaitu bantuan dalam manajemen bencana. Derasnya aliran serta meningkatnya debit air Sungai Brahmaputra di waktu tertentu dapat berdampak terhadap bencana alam lain selain banjir, yaitu tanah longsor di sepanjang aliran sungai. Selain berpotensi untuk mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta kerugian material, bencana tanah longsor dapat berujung kepada tersendatnya aliran Sungai Brahmaputra yang mengakibatkan munculnya genangan-genangan air yang semakin lama semakin membesar. Fenomena tersebut selanjutnya dapat berakibat terhadap tersendatnya aliran Sungai Brahmaputra yang sewaktu-waktu dapat memicu bencana banjir yang lebih besar lagi akibat adanya genangan-genangan air. Bantuan manajemen bencana dari Tiongkok selanjutnya memberikan informasi tentang adanya potensi bencana yang dapat terjadi, khususnya banjir serta tanah longsor yang dapat merugikan India.

3.3. Perbandingan Keuntungan dan Kerugian India dalam Kerja Sama Pengelolaan Sungai Brahmaputra dengan Tiongkok

Berdasarkan penjabaran yang telah dilakukajn sebelumnya, India terlihat mengalami lebih banyak kerugian daripada keuntungan dari aktivitas Tiongkok di Sungai Brahmaputra. Namun India tetap melanjutkan kerja sama dengan Tiongkok, walaupun kenyataannya India tidak memperoleh keuntungan signifikan. Sehingga untuk memahaminya lebih lanjut, penulis harus lebih lanjut lagi memberikan rasionalisasi dari pilihan India yang melanjutkan kerja samanya dengan Tiongkok.

Tabel 3.3. Perbandingan Keuntungan dan Kerugian India dan Tiongkok

	India	Tiongkok
Kooperatif	Laporan Hidrologi, ELM, Manajemen Bencana	Pembayaran 850.000 Yuan dari India
Non-Kooperatif	-	Pengelolaan Sungai Brahmaputra Tanpa Pertimbangan India

Berdasarkan perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa India hanya mendapatkan keuntungan dengan melakukan kerja sama dengan Tiongkok dan tidak memperoleh keuntungan apapun jika memilih untuk tidak melakukan kerja sama. Tiongkok di sisi lain lebih diuntungkan jika tidak melakukan kerja sama dengan India karena negara tersebut dapat secara bebas memanfaatkan Sungai Brahmaputra tanpa mempertimbangkan kepentingan dari India. Situasi ini membuat pilihan yang paling rasional bagi India adalah untuk tetap melanjutkan kerja sama dengan Tiongkok dalam pengelolaan Sungai Brahmaputra. Selain memberikan keuntungan yang nyata seperti laporan hidrologi serta ELM, berlanjutnya kerja sama dengan Tiongkok juga berarti memberikan kesempatan bagi India agar terhindar dari perang air dengan Tiongkok untuk mengamankan kepentingan air negaranya.

Sehingga daripada mengamankan secara militer, akan lebih baik bagi India untuk melakukan de-sekritisasi dalam hal pengelolaan Sungai Brahmaputra. Hal ini

dikarenakan keuntungan dan kemampuan yang dimiliki oleh Tiongkok lebih besar daripada India jika harus berhadapan dalam kontestasi militer. Maka dari itu penulis berargumen bahwa de-sekuritisasi merupakan alternatif solusi terbaik bagi India untuk mengamankan kepentingan airnya di Sungai Brahmaputra.

BAB IV

DE-SEKURITISASI KONFLIK BRAHMAPUTRA SEBAGAI PILIHAN RASIONAL BAGI INDIA

Selama ini India selalu menganggap aktivitas Tiongkok di Sungai Brahmaputra sebagai sebuah ancaman bagi keamanan air India. Kondisi ini membuat pihak India selalu berusaha untuk mengamankan kepentingan negaranya dengan menganggap bahwa permasalahan ini adalah permasalahan serius yang mengancam kepentingan nasional. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari permasalahan di Sungai Brahmaputra yang awalnya berfokus kepada aspek lingkungan serta domestik menjadi ancaman serius setelah dimulainya proyek pembangunan bendungan Tiongkok di bagian hilir sungai. Kondisi tersebut selanjutnya menjadi dasar dari penggunaan teori de-sekritisasi untuk menjelaskan terjadinya pergeseran fokus keamanan India di Sungai Brahmaputra.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, fokus kebijakan India di Sungai Brahmaputra selalu mengacu kepada kebijakan Tiongkok, termasuk dalam hal keamanan. Kenyataan ini tercermin pada awal munculnya kerja sama kedua negara yang terjadi setelah bencana banjir di Arunachal Pradesh pada tahun 2000 yang diduga sebagai dampak dari bocornya bendungan Tiongkok (walaupun tidak diakui hingga sekarang) yang merupakan ancaman nyata aktivitas Tiongkok terhadap keamanan India. Sehingga kejadian tersebut dapat dianggap sebagai titik pergeseran dari isu keamanan air India di Sungai Brahmaputra.

Walaupun banjir tersebut merebut korban jiwa serta mengakibatkan kerugian bagi pihak India, pemerintah India pada akhirnya memutuskan untuk menganggap bahwa banjir tersebut merupakan bencana yang muncul secara alami. Keputusan tersebut mencerminkan strategi kedua yang disampaikan oleh Waever (2002) dimana negara berusaha sebisa mungkin mencegah isu-isu keamanan agar tidak semakin meningkat dan semakin memperburuk hubungan negara-negara yang bersangkutan. Sehingga pada akhirnya pemerintah India memutuskan untuk

menggunakan pendekatan yang bertentangan dengan opini publik serta pemberitaan media yang cenderung agersif dan anti-Tiongkok.

Hal tersebut kembali terulang pasca terjadinya Konfontasi Doklam tahun 2017. Hubungan bilateral antara India dan Tiongkok sempat terhenti selama kurang lebih dua bulan, termasuk dalam hal kerja sama di semua bidang. Walaupun demikian, hubungan kedua negara segera kembali ke kondisi sebelum konflik dan terkesan seperti tidak terjadi apa-apa. Namun pembehentian tersebut berdampak ke kerja sama antara kedua negara, termasuk dalam kerja sama kedua negara di Sungai Brahmaputra.

India memang merasa dirugikan dan sempat menanyakan perihal pemberhentian penyediaan laporan serta pertemuan ELM kepada Tiongkok. Tetapi setelah Tiongkok memberikan jawaban bahwa pemberhentian tersebut dikarenakan rusaknya alat yang digunakan untuk pendataan akibat banjir, tidak ada usaha dari India untuk menekan Tiongkok untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut, padahal Tiongkok tetap memberikan laporan hidrologi kepada Bangladesh (BBC, 2017). Berkaca dari pengalaman sebelumnya, India kembali menerapkan strategi kedua Waever untuk tidak memperburuk situasi hubungan dengan Tiongkok agar kerja sama kedua negara dapat berjalan kembali.

Upaya India untuk menggeser isu keamanan di Sungai Brahmaputra menjadi permasalahan politik yang normal juga terlihat dalam pembentukan ELM. Dipilihnya mekanisme tingkat ahli dibandingkan perjanjian air dianggap sebagai pilihan yang lebih rasional untuk mendorong Tiongkok dalam melakukan kerja sama dengan India, utamanya dalam pengelolaan sungai lintas-batas. Keengganan Tiongkok dalam menandatangani perjanjian air sungai internasional telah tercermin sebelumnya dalam kasus Sungai Mekong yang kemudian membuat India memilih alternatif lain untuk meyakinkan Tiongkok. Sehingga solusi yang dipilih India adalah dengan membentuk sebuah organisasi yang dapat menghubungkan pihak India dan Tiongkok agar tercapai kesepakatan dalam aspek pemanfaatan sungai namun tetap memperhitungkan keputusan dari masing-

masing pemerintah terkait dengan kebijakan yang akan diambil (Feng, Wang, & Liu, 2019).

Dibentuknya ELM merupakan contoh nyata dari upaya India dalam menggeser pandangan Tiongkok maupun masyarakatnya sendiri agar tidak menganggap bahwa permasalahan di Sungai Brahmaputra merupakan permasalahan yang serius. Tetapi di saat yang bersamaan pihak India juga berusaha untuk mengamankan kepentingan negaranya dalam memanfaatkan Sungai Brahmaputra melalui kerja sama yang dilakukan dengan Tiongkok. Sehingga hal tersebut sesuai dengan strategi ketiga de-sekuritisasi dari Waever (2000) yang menyebutkan bahwa adanya upaya untuk membawa kembali isu keamanan menjadi isu politik yang normal.

Sehingga berdasarkan keputusan serta kebijakan yang dikeluarkan India terlihat adanya upaya untuk melakukan de-sekuritisasi dalam konflik di Sungai Brahmaputra melalui kerja sama yang dilakukan dengan Tiongkok. Terdapat dua tujuan utama dari India dalam menggunakan strategi tersebut: Pertama, India berupaya untuk mengawasi serta memastikan bahwa aktivitas Tiongkok di Sungai Brahmaputra tidak akan mengancam kepentingan India. Walaupun India tidak bisa menekan Tiongkok secara politik, tetapi kerja sama yang ada cukup untuk membuat pemerintah India tahu akan situasi aliran sungai serta aktivitas Tiongkok di hilir sungai. Kedua, tujuan lainnya adalah untuk memastikan tidak adanya tensi antara kedua belah pihak, mengingat masyarakat India memiliki sentimen anti-Tiongkok yang cukup tinggi jika berkaitan dengan pengelolaan Sungai Brahmaputra. Dengan menunjukkan bahwa kedua pemerintah saling bekerja sama, pihak-pihak lainnya akan menganggap bahwa tidak adanya konflik besar yang terjadi antara kedua negara dalam pemanfaatan sungai tersebut.

Penjabaran tersebut selanjutnya menunjukkan bahwa de-sekuritisasi merupakan solusi alternatif rasional yang dipilih India untuk menjamin keamanan airnya, terlepas dari seluruh konflik serta perselisihan yang ada antara kedua negara. Hal ini sesuai dengan teori rasionalitas air yang menyebutkan bahwa negara-negara yang berkonflik pada akhirnya akan memilih untuk melakukan bekerja sama

sebagai upaya untuk memastikan keamanan airnya dalam jangka panjang (Alam, 1998). Teori inilah yang selanjutnya menjadi dasar bagi India dalam melanjutkan kerja samanya dengan Tiongkok, walaupun hingga saat ini pihak India tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan dan malah terkesan dirugikan dengan aktivitas Tiongkok yang intens di bagian hilir Sungai Brahmaputra

BAB V

KESIMPULAN

India merupakan salah satu negara riparian yang kepentingannya terancam akibat aktivitas Tiongkok di Sungai Brahmaputra. Ancaman tersebut sebagian besar berasal dari pembangunan bendungan Tiongkok di Sungai Brahmaputra yang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan energinya saja, melainkan juga sebagai bagian dari proyek membelokkan aliran sungai untuk memenuhi kebutuhan air Tiongkok di wilayah Xinjiang (Chen, 2017). Kondisi ini juga diperparah dengan terbaginya pandangan antara masyarakat dan Pemerintah India dalam menanggapi isu di Sungai Brahmaputra, yang mana pihak masyarakat lebih berani dalam menyuarakan rasa cemas dan curiganya dibandingkan dengan pihak pemerintahnya yang lebih memilih pendekatan rasional dengan tetap melakukan kerja sama dengan pihak Tiongkok. Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan penelitian, yakni “mengapa India kembali melanjutkan kerja sama di Sungai Brahmaputra dengan Tiongkok?”, dengan tujuan untuk juga mengetahui motif India dalam melanjutkan kerja sama terlepas dari terjadinya Konfrontasi Doklam serta segala pro dan kontra di internal India sendiri.

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, peneliti berhipotesis bahwa motif utama dari India dalam melakukan kerja sama di Sungai Brahmaputra adalah untuk menjaga keamanan air yang mengalir ke India. Hipotesis ini didasarkan oleh kondisi geografi India yang relatif di bawah Tiongkok serta aktivitas Tiongkok yang berpotensi untuk mengancam aliran utama Sungai Brahmaputra. Menariknya, India tetap berusaha untuk mengamankan kepentingannya di Sungai Brahmaputra melalui kerja sama dan bukan melalui peperangan. Sehingga keputusan India ini menunjukkan dukungan terhadap teori rasionalitas air yang menyimpulkan bahwa pada akhirnya negara-negara riparian yang memperebutkan sumber daya air lintas-batas akan menemukan jalan untuk melakukan kerja sama sebagai solusi untuk keamanan air jangka panjang.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa setidaknya terdapat tiga permasalahan dalam hal keamanan air India yang mendorong terjadinya kerja sama dengan Tiongkok. Pertama, aktivitas pembangunan Tiongkok serta proyek pembelokkan aliran sungai sangat berpotensi untuk menciptakan inkonsistensi terhadap debit air untuk kebutuhan irigasi India. Inkonsistensi tersebut selanjutnya dapat berdampak kepada terjadinya gagal panen hingga salinasi yang dapat memicu keributan sosial di daerah Assam yang sangat bergantung terhadap air dari Sungai Brahmaputra untuk keperluan pangan mereka. Kedua, meningkatnya kandungan polusi di Sungai Brahmaputra akibat aktivitas Tiongkok yang mengancam lingkungan. Meningkatnya kandungan polusi di Sungai Brahmaputra akibat aktivitas Tiongkok memiliki dampak serius terhadap kualitas air sungai serta ekosistem yang ada di dalamnya. Kondisi ini berujung kepada menurunnya jumlah ikan yang bisa ditangkap dan membuat air sungai tersebut sangat tidak layak untuk dikonsumsi. Ketiga, aktivitas Tiongkok di Sungai Brahmaputra dapat meningkatkan potensi terjadinya banjir di musim hujan. Meningkatnya curah hujan serta debit air yang ditampung di Bendungan Zangmu dapat berakibat kepada banjir bandang yang fatal, utamanya di kawasan yang rawan seperti Assam yang setiap tahunnya selalu menghadapi ancaman bencana alam tersebut. Jika Tiongkok tetap melanjutkan rencananya untuk membangun bendungan lain dengan kapasitas yang besar, maka tidak menutup kemungkinan bahwa banjir yang terjadi akan semakin memburuk.

Permasalahan-permasalahan tersebut selanjutnya bukanlah menjadi penghalang, melainkan sebagai jembatan penghubung yang mengharuskan India untuk melanjutkan kerja sama dengan Tiongkok untuk menjamin keamanan air di Sungai Brahmaputra dalam jangka panjang. Kerja sama antara India dan Tiongkok telah mengalami perkembangan sejak 2002 hingga 2017 sebelum terjadinya konfrontasi di Doklam, dan bahkan penandatanganan MOU pada tahun 2018 juga menunjukkan arti penting dari kerja sama tersebut bagi India. Kerja sama yang pada awalnya hanya berupa pertukaran laporan hidrologi kemudian berkembang menjadi kerja sama dengan mekanisme ahli (ELM) untuk membangun saling pengertian mengenai isu-isu kepentingan bersama serta

mekanisme penanggulangan keadaan darurat. Perkembangan tersebut merupakan sebuah hasil yang sangat menguntungkan India dalam menjamin keamanan air di Sungai Brahmaputra tanpa perlu untuk menggunakan kekuatannya secara berlebihan.

Walaupun India dan Tiongkok telah berhasil menjaga stabilitas dan perdamaian di Sungai Brahmaputra melalui kerja sama yang dilakukan, terdapat permasalahan mendasar yang dapat mengancam kelanjutan dari kerja sama tersebut. Pertama, kerja sama bilateral di Sungai Brahmaputra antara keduanya masih dipengaruhi oleh kondisi hubungan diplomatik kedua negara secara umum. Perang India-Tiongkok tahun 1962 dan Konfrontasi Doklam tahun 2017 menjadi bukti bahwa ketika tensi antara kedua negara kembali meningkat maka tidak menutup kemungkinan kerja sama dalam sungai lintas-batas dapat terhenti, termasuk di Sungai Brahmaputra. Terhentinya kerja sama tersebut tentu saja berdampak buruk terhadap perkembangan-perkembangan yang telah terjadi sebelumnya dan memberikan dampak kerugian yang besar bagi India yang membutuhkan bantuan dari Tiongkok.

Kedua, kerja sama antara India dan Tiongkok di Sungai Brahmaputra mengalami stagnansi. Hal ini dibuktikan dengan kerja sama yang berupa pembagian data setahun sekali antara kedua negara tanpa adanya perjanjian atau mekanisme bersama yang mengatur tentang kerja sama pembagian air, padahal kerja sama antara kedua negara di Sungai Brahmaputra telah berlangsung sejak tahun 2002. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, tetapi yang utama adalah keengganan Tiongkok untuk memiliki kerja sama yang mengikat dalam hal sungai lintas-batas, serta lebih banyaknya tugas yang harus diemban oleh Tiongkok jika kerja sama ini akan berkembang ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Jika kerja sama antara India dan Tiongkok tidak dapat berkembang lagi menjadi kerja sama yang lebih kuat dan mengikat, maka tidak ada jaminan bahwa keamanan air India akan terus terjaga dengan adanya aktivitas dominan Tiongkok di hulu sungai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa India membutuhkan kerja sama di Sungai Brahmaputra dengan Tiongkok untuk menjamin keamanan airnya dalam jangka

panjang, sesuai dengan teori rasionalitas air yang telah dijelaskan. Kondisi ini membuat Pemerintah India mengambil pendekatan yang lebih halus dan rasional dalam menanggapi permasalahan yang ada, terlepas dari opini publik yang terus menyudutkan Tiongkok. Pemerintah India juga terus berusaha untuk mendesak pihak Tiongkok untuk meningkatkan kerja sama di Sungai Brahmaputra untuk lebih menjamin keamanan airnya, hanya saja pihak Tiongkok masih tidak memiliki niatan untuk melakukan perjanjian air atau mekanisme gabungan. Kendati demikian, jika kedua negara tetap mempertahankan iklim hubungan diplomatik yang positif serta mampu untuk menahan diri, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kerja sama tersebut akan berlandaskan perjanjian dan memiliki institusi yang resmi. Sehingga hubungan bilateral India dan Tiongkok merupakan salah satu faktor pendukung untuk menjamin keamanan air dari masing-masing negara.

Sehingga sebagai solusi alternatif untuk memastikan keamanan airnya, pemerintah India memilih de-sekuritisasi konflik di Sungai Brahmaputra. Hal ini terlihat pada normalisasi hubungan India-Tiongkok pasca Konfrontasi Doklam dalam hal kerja sama di Sungai Brahmaputra, dimana pihak India memilih untuk tidak begitu menekan Tiongkok serta mencegah terjadinya eskalasi konflik antara kedua negara di sungai tersebut. Pihak India juga berusaha untuk melanjutkan kembali kerja sama di Sungai Brahmaputra yang kemudian berujung kepada penandatanganan MOU pada tahun 2018 antara kedua negara. Karena bagi India, hanya dengan melakukan hal tersebut pihaknya dapat memastikan keamanan air dalam jangka panjang tanpa harus terlibat perang bersenjata dengan Tiongkok.

Peneliti menyadari bahwa penelitian yang dilakukan ini masih memiliki kekurangan. Salah satu kekurangan dari penelitian ini adalah pembahasan yang sangat terbatas kepada keamanan air India dengan kerangka teori rasionalitas air dan konflik air yang membuat faktor lainnya tidak sempat dibahas. Peneliti berharap bahwa penelitian-penelitian lainnya di masa depan dapat menjelaskan kasus ini berdasarkan faktor-faktor tersebut atau dengan perspektif lainnya. Kekurangan lain yang disoroti adalah keterbatasan data primer yang diperoleh

untuk mendukung argumen peneliti akibat minimnya data yang ada serta keterbatasan bahasa yang membuat beberapa data tidak dapat disampaikan dalam penelitian ini. Pada akhirnya peneliti hanya dapat bergantung terhadap penelitian-penelitian sebelumnya serta data pendukung lainnya yang terdapat di situs internet. Sehingga peneliti berharap bahwa penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa dapat menggunakan lebih banyak lagi data primer untuk membuat hasil penelitian lebih akurat lagi.

Daftar Pustaka

Artikel atau Jurnal Daring

- Ahlawat, Dalbir dan Hughes, Lindsay. 2018. "India-China Stand-Off in Doklam: Aligning Realism with National Characteristics. *The Round Table*, hal. 613-625. [Daring] <https://bit.ly/2TQolee> [diakses 18 Februari 2020]
- Arif, Sheikh Mohd. 2013. "A History of Sino-Indian Relations: From Conflict to Cooperation", *Academic Research Journals*, Vol. 1, No. 4, hal. 129-137. [Daring] <https://bit.ly/3cfP5LM> [diakses 18 Maret 2020].
- Bardalai, A. K. 2018. "Doklam and the Indo-China Boundary", *Journal of Defence Studies*, Vol. 12, No. 1, hal. 5-13 [Daring] <https://bit.ly/2XdRH8P> [diakses 20 Maret 2020].
- Bhonsale, Mihir. 2018. "Understanding Sino-Indian Border Issues: An Analysis of Incidents Reported in the Indian Media", *ORF Occasional Paper*, No. 143. [Daring] <https://bit.ly/2TULxIC> [diakses 9 Mei 2020].
- Barnaby, Wendy. 2009. "Do Nations Go to War Over Water?", *Nature* 458(7236), hal. 282-283. [Daring] <https://bit.ly/3ezmvGy> [diakses 10 Maret 2020].
- Bhattacharjya, B. K., Bhaumik, U., & Sharma, A. P. 2017. "Fish Habitat and Fisheries of Brahmaputra River in Assam, India", *Aquatic Ecosystem Health & Management* Vol. 20, No. 1-2, hal. 102-115. [Daring] <https://bit.ly/3djmExN> [diakses 12 Mei 2020].
- Bhattachaya, Shreya. 2018. "China's Hydro Ambitions and the Brahmaputra", *Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analysis*. [Daring] <https://bit.ly/3dgc3DH> [diakses 12 Mei 2020].
- Chellaney, Brahma. 2009. "Coming Water Wars", *The International Economy*, hal. 38-39. [Daring] <https://bit.ly/2BgcvUz> [diakses 21 Januari 2020].
- _____. 2014. "Water, Power, and Competition in Asia", *Asian Survey* Vol. 54, No. 4, hal. 621-650. [Daring] <https://bit.ly/3drYn93> [diakses 31 Maret 2020].
- _____. 2017. "A New Front in Asia's Water War", *Project Syndicate*. [Daring] <https://bit.ly/2TOaK7m> [diakses 20 Mei 2020]

- _____. 2019. "China is Weaponizing Water and Worsening Droughts in Asia", *Nikkei Asian Review*. [Daring] <https://s.nikkei.com/3cxgFnI> [diakses 4 Mei 2020]
- Cosgrove, William J. 2003. "Water Security and Peace", *Water Security and Peace: A Synthesis of Studies Prepared under the PCCP-Water for Peace Process*, hal. 3-8. [Daring] <https://bit.ly/2McZvB6> [diakses 10 Maret 2020]
- Das, Partha Jyothi. 2013. "Resolving Conflicts in the Brahmaputra River Basin by Promoting Scientific Collaboration and Information Sharing", *Brahmaputra Towards Unity*, hal. 46-50. [Daring] <https://bit.ly/3chdO2h> [diakses 24 Maret 2020].
- Feng, Yan, Wang, Wenling, dan Liu, Jiang. 2019. "Dilemmas in and Pathways to Transboundary Water Cooperation between China and India on the Yaluzanbu-Brahmaputra River", *Water* 2019, Artikel 11. [Daring] <https://bit.ly/36J43sy> [diakses 28 Mei 2020].
- Gupta, Joydeep. 2018. "China Resumes Sharing Brahmaputra Water Flow Data with India", *Thirdpole: Understanding Asia's Water Crisis*. [Daring] <https://bit.ly/2ApCdpi> [diakses 11 Maret 2020]
- Hussain, Wasbir. 2013. "India & China: An Assessment of October 2013 Agreements: MOU on the Brahmaputra River", *Institute of Peace and Conflict Studies*. [Daring] <https://bit.ly/3ciByCZ> [diakses pada 23 Maret 2020].
- Holslag, Jonathan. 2011. "Assessing the Sino-Indian Water Dispute", *Journal of International Affairs*, Vol. 64, No. 2, hal. 19-35. [Daring] <https://bit.ly/36EMx8S> [diakses 25 Mei 2020].
- Kalyanaraman, S., dan Ribeiro, Erik H. 2017. "The China-India Doklam Crisis, Its Regional Implications and the Structural Factor", *Boletim de Conjuntura Nerint*, Vol. 2, No. 7, hal. 56-69 [Daring] <https://bit.ly/36F1fN6> [diakses 20 Maret 2020].
- Kaur, Navjot & Dhiman, Megha. 2018. "2017 Indo-China Doklam Standoff: Breaking Resistance Without Fighting" *Research Review Journal*, Vol. 3, No. 5, hal. 8-12. [Daring] <https://bit.ly/36DZVdo> [diakses pada 20 Februari 2020].

- Livermore, Doug. 2018. "China's "Three Warfares" in Theory and Practice in the South China Sea", *Georgetown Security Studies Review*. [Daring] <https://bit.ly/3ck3mXD> [diakses 20 Maret 2020]
- Lovelle, Madeline. 2016. "Co-operation and the Brahmaputra: China and India Water Sharing", *Future Directions International*. [Daring] <https://bit.ly/3gEgR8i> [diakses 24 Mei 2020].
- Mahanta, C., et al. 2014. "Brahmaputra: Issues in Development" dalam *Physical Assessment of the Brahmaputra River; Ecosystem for Life: A Bangladesh India Initiative*. International Union for Conservation of Nature. [Daring] <https://bit.ly/3ewMDC1> [diakses 20 Mei 2020]
- Nayak, Purusottam & Panda, Bhagirathi. 2016. "Brahmaputra and the Social Economic Life of Assam". [Daring] dalam <https://bit.ly/2MFP0ar> [Diakses 22 Januari 2020].
- Rehman, Teresa. 2013. "Dialogue of the Deaf", *Brahmaputra Towards Unity*, hal. 15-18. [Daring] <https://bit.ly/3chdO2h> [diakses 31 Maret 2020]
- Samaranayake, Nilanthi, Limaye, Satu, dan Wuthnow, Joel, 2016. "Introduction", *Water Resource Competition in the Brahmaputra River Basin: China, India, and Bangladesh*, hal. 1-14 [Daring] <https://bit.ly/2XgBKyF> [diakses 22 Maret 2020].
- Samaranayake, Nilanthi. 2016. "The Middle Riparian's Quandaries: India and the Brahmaputra River Basin", *Water Resource Competition in the Brahmaputra River Basin: China, India, and Bangladesh*, hal. 38-64 [Daring] <https://bit.ly/2XgBKyF> [diakses 22 Maret 2020].
- _____. 2018. "Upstream, Downstream: Reflections on India's Riparian Relationships on the Brahmaputra", *Raging Waters*, hal. 38-70. [Daring] <https://bit.ly/36FChx9> [diakses 28 Mei 2020]
- Schmeier, Susanne. 2017. "What is Water Diplomacy and Why Should You Care?", *Global Water Forum*. [Daring] <https://bit.ly/2MdI97n> [diakses 17 Mei 2020].
- Thapliyal, Sheru. 2018. "When Chinese Were Given a Bloody Nose", *Indian Defence Review*. [Daring] <https://bit.ly/3ch2FP4> [diakses 20 Maret 2020].

Waever, Ole, 2000. "The EU as a Security Actor: Reflections from a Pessimistic Constructivist on Post-Sovereign Security Orders.", *International Relations Theory and the Politics of European Integration: Power, Security, and Community*, Kelstrup, Morten dan Williams, Michael C. London: Routledge. hal. 250-294. [Daring] <https://bit.ly/2YVvCww> [Diakses 4 Juli 2020].

Wuthnow, Joel. 2016. "Water Power, Water Worries: China's Goals and Challenges as the Brahmaputra's Uppermost Riparian", *Water Resource Competition in the Brahmaputra River Basin: China, India, and Bangladesh*, hal. 15-37 [Daring] <https://bit.ly/2XgBKyF> [diakses 22 Maret 2020].

_____. 2017. "Did China Use Water as A Weapon in the Doklam Standoff?", *Texas National Security Review: War on the Rocks*. [Daring] <https://bit.ly/2BgtNAT> [diakses 22 Maret 2020].

_____. 2018. "Water Power, Water Worries: China's Goals and Challenges as the Brahmaputra's Uppermost Riparian", *Raging Waters*, hal. 13-37. [Daring] <https://bit.ly/36FChx9> [diakses 28 Mei 2020].

Wolf, Aaron T. 1999. "'Waterwars' and Water Reality: Conflict and Cooperation Along International Waterways", *Environmental Change, Adaptation, and Security*. NATO ASI Series (2. Environment), Vol. 65, hal. 251-265. [Daring] <https://bit.ly/2zI4CXu> [diakses 18 Mei 2020].

Yasuda et al. 2017. "Transboundary Water Cooperation over the Brahmaputra River: Legal Political Economy Analysis of Current and Future Potential Cooperation", *The Hague Institute of Global Justice*. [Daring] <https://bit.ly/2McTBjr> [diakses 20 Mei 2020]

Yong, Yang. 2013. "Hydropower Challenges for the Brahmaputra a Chinese Perspective". *Brahmaputra Towards Unity*, hal. 9-14. [Daring] <https://bit.ly/3chdO2h> [diakses 14 Mei 2020].

Buku atau Artikel dalam Buku

van Eekelen, Willem. 2015. "Sino-Indian Relations Prior to 1954", *Indian Foreign Policy and the Border Dispute with China: A New Look at Asian Relationships*, hal. 8-52. Leiden: Kononklijke Brill.

_____. 2015. "The Border Dispute with China", *Indian Foreign Policy and the Border Dispute with China: A New Look at Asian Relationships*, hal. 94-148. Leiden: Kononklijke Brill.

_____. 2015. "Sino-Indian Relations after the War of 1962", *Indian Foreign Policy and the Border Dispute with China: A New Look at Asian Relationships*, hal. 234-263. Leiden: Kononklijke Brill.

Fravel, M. Taylor. 2008. "Cooperation in Frontier Disputes in the 1960s", *Strong Borders, Secure Nation: Cooperation and Conflict in China's Territorial Dispute*, hal. 70-125, Princeton University Press.

Media Massa Daring

BBC. 2017. "China and India Water 'Dispute' After Border Stand-Off" [Daring] <https://bbc.in/2ZSKj4f> [diakses 20 Maret 2020].

Chaudary, Archana dan Mangi, Faseeh. 2020. "New Weather Patterns are Turning Water Into a Weapon", *Bloomberg*. [Daring] <https://bloom.bg/3er3uGg> [diakses 2 Mei 2020].

Chen, Stephen. 2017. "Chinese Engineers Plan 1,000 Km Tunnel to Mak Xinjiang Desert Bloom", *South China Morning Post*. [Daring] <https://bit.ly/2Xg3svi> [diakses 14 Mei 2020].

Davies, Richard. 2017. "India-Third Wave of Flooding Hits Assam, 2 Million Affected", *Floodlist*. [Daring] <https://bit.ly/2ZPVCtT> [diakses 12 Mei 2020]

Dutta, Saptarishi. 2017. "Once Assam's Lifeline, The Brahmaputra River Today Is Struggling with Oil Pollution and Waste Disposal Which Are Gradually Rendering It Lifeless". *Swach Hindia*. [Daring] <https://bit.ly/3gz4R7P> [diakses 10 Mei 2020].

Guwahati Plus. 2017. "Water Turbidity Hits Aquatic Fauna". [Daring] <https://bit.ly/3epIgsy> [diakses 14 Mei 2020].

International Rivers. 2013. "Brahmaputra/Yarlung Tsangpo" [Daring] <https://bit.ly/2YSbawq> [diakses 30 Juni 2020]

- Montague, Jules. 2018. "The 'River People' Under Threat", *BBC*. [Daring] <https://bbc.in/3dhA2ma> [diakses 12 Mei 2020].
- One India. 2008. "Another Chinese Intrusion in Sikkim" [Daring] <https://bit.ly/2M8owNW> [diakses 18 Maret 2020]
- The Economic Times. 2018. "China Planning 1,000 Km Tunnel to Divert Brahmaputra Waters" [Daring] <https://bit.ly/3euFemQ> [diakses 13 Maret 2020].
- _____. 2019. "China Begins Sharing Hydrological Data for Brahmaputra for Monsoon Season" [Daring] <https://bit.ly/2AkQFi6> [diakses 24 Januari 2020].
- The Logical Indian. 2017. "Guwahati: Brahmaputra Turbidity Decreases City Fish Population". [Daring] <https://bit.ly/2Xglldy> [diakses 12 Mei 2020].
- The Times of India. 2017. "China to Blame for Polluting Brahmaputra: Assam" [Daring] <https://bit.ly/2TRR5Ui> [diakses 11 Mei 2020].
- _____. 2018. "India, China ink 2 MOUs on Sharing of Brahmaputra River Data and Supply of Non-Basmati Rice" [Daring] <https://bit.ly/3ceVbfh> [diakses 17 Januari 2020].
- Xiao, Fan. 2018. "The 'Madcap' Scheme to Divert the Brahmaputra", *China Dialogue*. [Daring] <https://bit.ly/3ccUFhT> [diakses 20 Maret 2020].
- Yusha, Zhao. 2017. "China Has to Halt River Data Sharing as India Infringes on Sovereignty: Expert", *Global Times*. [Daring] <https://bit.ly/3etNV0L> [diakses 20 Maret 2020].

Thesis/Disertasi

- Alam, Undula Z. 1998. "Water Rationality: Mediating the Indus Water Treaty", Thesis, Durham University. [Daring] <https://bit.ly/2ZPEXXm> [diakses 27 Mei 2020].
- Fako, Edin. 2012. "Strategies of Desecuritization", Thesis, Central European University. [Daring] <https://bit.ly/3ipN18p> [diakses 4 Juli 2020].

Situs Resmi

- Kementerian Luar Negeri India. 2011. "Reports of Construction of Dam on Brahmaputra River by China". [Daring] <https://bit.ly/2XOWkFs> [diakses 11 Mei 2020]

- _____. 2013. “Memorandum of Understanding between the Ministry of Water Resources, the Republic of India and the Ministry of Water Resources, the People’s Republic of China on Strengthening Cooperation on Trans-border Rivers” [Daring] <https://bit.ly/3cehnWT> [diakses 20 Februari 2020].
- _____. 2015. “Q No. 52 Dam on Brahmaputra”. [Daring] <https://bit.ly/2XjTQjn> [diakses 10 Mei 2020].

Kementerian Jal Shakti India. 2013. “India-China Cooperation” [Daring] <https://bit.ly/2ZQO7CX> [diakses 22 Maret 2020].

Lain Lain

- Cuppari, Rosa. 2017. “Water Cooperation”, *International Centre for Water Resources and Global Change: Policy Brief*, No. 2. [Daring] <https://bit.ly/2TO9Mb5> [diakses 13 Maret 2020].
- Menon, Prakash dan Kanisetti, Anirudh. 2018. “The Doklam Imbroglio”, *Takshashila Discussion Document*. [Daring] <https://bit.ly/2TLrk7Z> [diakses 23 Maret 2020].
- Ranjan, Amit. 2013. “India-China MOU on Transboundary Rivers”, *Indian Council of World Affairs: Viewpoint*. [Daring] <https://bit.ly/2XWqCGn> [diakses 28 Mei 2020].
- Schultz, Bart, dan Uhlenbrook, Stefan. 2007. “Water Security: What Does It Mean, What May It Imply?”, *UNESCO-IHE: Discussion Draft Paper*. [Daring] <https://bit.ly/3dgnYSa> [diakses 20 Mei 2020].
- Sindico, Francesco. 2016. “Transboundary Water Cooperation and the Sustainable Development Goals”, *UNESCO-IHP: Advocacy Paper*. [Daring] <https://bit.ly/3gD7vcA> [diakses 13 Maret 2020].